

**KEMITRAAN PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DAOP VII MADIUN DENGAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN**

Skripsi

**Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun oleh:

HENDRO WIJAYANTO

NIM 0510310053



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2009

MOTTO

"Hidup bukanlah untuk bersenang-senang"



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, Juli 2009

Mahasiswa

Nama : Hendro Wijayanto

NIM : 0510310053



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **KEMITRAAN PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DAOP VII MADIUN DENGAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN.**

Disusun Oleh : Hendro Wijayanto

NIM : 0510310053

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, Juli 2009

Komisi pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
NIP. 132 205 407

Drs. Aspan Munadi, M.AP
NIP. 130 368 757

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 6 Agustus 2009
 Jam : 08.00 WIB
 Skripsi atas nama : Hendro Wijayanto
 Judul : **KEMITRAAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP VII MADIUN DENGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN**

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Dr. Imam Hanafi, S.Sos.,M.Si
 Ketua

Drs. Aspan Munadi, M. AP
 Anggota

Dr. Drs. Luqman hakim, M.Sc
 Anggota

Drs. Moch. Rozikin, M.AP
 Anggota

ABSTRAK

Hendro Wijayanto, 2009, **Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan**, Dr. Imam Hanafi, S.Sos.,M.Si, Drs. Aspan Munadi, M.AP, 98 Hal + xii

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 6,4% per tahun. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini memang harus kita sadari tidak terlepas dari peran usaha dengan skala besar. Usaha ini juga telah berperan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, keberhasilan yang dicapai di lain pihak juga menghasilkan dampak-dampak negatif yang ditinggalkan, seperti praktik-praktik bisnis yang tidak wajar seperti, monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni. Di samping itu, sistem ini tidak mengakar pada kepentingan rakyat dan makin memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antarwilayah atau antarsektor. Hal ini makin terasa setelah terjadinya krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Dampak paling buruk yang kita rasakan, selain yang disebutkan di atas adalah tingginya tingkat inflasi, tingginya pengangguran, pertumbuhan ekonomi negatif dan tingkat kemiskinan tinggi.

Bertolak dari gambaran seperti itu membuktikan bahwa sistem ekonomi konglomerasi tidak relevan untuk dipertahankan. Untuk itu pada saat ini perlu dikembangkannya sistem ekonomi kerakyatan dengan melakukan pemberdayaan atau pengembangan kepada sektor Usaha Kecil Menengah dan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha dari sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu bentuk pemberdayaan atau pengembangan UKM yang dilakukan pemerintah adalah dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dari kebijakan ini adalah agar nantinya para pelaku ekonomi kerakyatan yang dibina dapat didorong laju perkembangannya menjadi bentuk usaha yang lebih baik serta mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya

PT Kereta Api Indonesia (persero) adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang angkutan darat. Sejauh ini PT KAI persero telah melakukan PKBL sesuai dengan peraturan menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan program bina lingkungan. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah program kemitraan PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun dengan Usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Alasan dipilihnya PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun karena Madiun posisinya yang cukup strategis berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta. Kota ini juga menjadi persimpangan jalur menuju Ponorogo dan Pacitan ke arah selatan. Oleh karena itu, Kota Madiun ditetapkan sebagai wilayah hinterland atau pusat ekonomi untuk daerah sekitarnya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda No 6/2007). Selain itu Madiun merupakan pusat perekonomian Jawa timur sebelah barat.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam rangka melihat peran dari PT KAI (Persero) DAOP VII madiun

dalam mengembangkan Ekonomi kerakyatan. Dengan cara melihat program Kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah, proses dalam program kemitraan dan manfaat dari program kemitraan bagi perekonomian masyarakat sekitar terutama bagi UKM yang menjadi mitra bina dari PT KAI DAOP (Persero) VII Madiun.

Dari penelitian ilmiah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan yang diberikan oleh PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun tidak hanya dalam bentuk pinjaman modal namun juga dalam bentuk ilmu pengetahuan tentang proses manajerial serta pembukuan. Tata cara menjalankan suatu perusahaan secara profesional serta menjadi perusahaan yang mandiri, proses Program Kemitraan melalui tahap-tahap perencanaan yang matang dengan menyusun anggaran kegiatan dan anggaran serta menentukan persyaratan bagi para mitra binaan dengan kondisi lapangan. Pelaksanaan kemitraan terhadap usaha kecil dan menengah berupa pinjaman langsung uang tunai kepada mitra binaan yang telah melalui seleksi dan layak bina. Lamanya masa kemitraan maksimal 5 (lima) tahun. Proses evaluasi dilakukan dengan proses monitoring/pengawasan dan pembinaan, yaitu pembinaan manajerial dan pembukuan. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh mitra binaan dapat dirasakan secara langsung dengan pertumbuhan usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar baik regional maupun nasional. Dengan begitu upaya pembangunan Nasional yang lebih maju dan merata bisa tercapai.

Dalam pelaksanaannya program kemitraan ini perlu adanya transparansi agar UKM yang berada di wilayah Madiun dan sekitarnya bisa mengetahui adanya program kemitraan yang bisa digunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Disamping itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang lainnya yang mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah.



SUMMARY

Hendro wijayanto, 2009, **Partnership of PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun with Small and Middle of Business for Underground Economy Development**, Dr. Imam Hanafi, S.Sos.,M.Si, Drs. Aspan Munadi, M.AP, 98 Hal + xii

During recent years, Indonesia succeeded in reaching 6.4% economic growth per year. The high growth was come from great efforts. The effort has role to play in the Gross Domestic Product establishing. But, the success that has been reached also produced negative impacts. The conglomeration economic system occurrence is stained by inappropriate business practices such as monopoly, monosopny, oligopoly, and alogosopny. Beside that, the system not rooted to the people interest, and widen the gap between the rich and the poor, between region and sectors. It is felt more after the monetary crisis and develop to be economic crisis and trust crisis to government. The worst impact beside the mentioned above, the high inflation, the high unemployment, negative economic growth, and high poverty level.

Depart from the picture, it proved that the conglomeration economic system is not relevant. Then it needs to be developed underground economy system by conducting small business and cooperative empowerment. One of empowerment or small business development that was done by government by Partnership and Environmental Building (PKBL) by State Owned Corporation (BUMN). The policy aimed at building the underground economy performers and supports the them to be better business and able to give job opportunities for around society.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is one of BUMN that run in the land transportation sectors. So far PT KAI Persero has conducted PKBL according to Ministerial Decree No. Per-05/MBU/2007 about BUMN Partnership Program with Small Business and Environmental Building. So that become the focus of the research is the partnership program of PT KAI of DAOP VII Madiun with small and medium businesses in developing underground economy. The reason to choose PT KAI DAOP IV Madiun because of its strategic position at the main line of Surabaya – Yogyakarta. The city become the line intersection to Ponorogo and Pacitan to south direction. Because of that, Madiun city is determined as hinterland area or economic center for its around area in the Space and Regional Plan (Local Regulation No 6 f 2007). Beside that Madiun is the center of east java economic of west area.

The research by using descriptive method with qualitative approach was conducted to look at the role of PT KAI DAOP IV Madiun in developing the underground economy. By looking at the partnership program of PT KAI DAOP IV Madiun with small and medium business, process in the partnership and benefit of partnership program for around society especially for small and medium business that become the partner of PT KAI DAOP IV Madiun.

From the research, it can be concluded that the partnership of PT KAI DAOP IV Madiun not only in the form of capital loan but also in the form of knowledge about managerial process and book keeping. The way to run company professionally and become independent company, the partnership program through matured plan by

compiling the activities budget and budget and determine the requirement for the built partners with the field condition. The partnership implementation toward small and medium business in the form of direct cash loan to the partner through selection and the appropriateness. The partnership period maximum 5 years. The evaluation is done by monitoring / control process and building, that is managerial and book keeping building. Then, the benefit that is obtained by the partner can be felt directly with the business growth to improve the societal economic either regionally or nationally. So, the more advanced and even national development effort can be achieved.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan ridho dan ma'unah-Nya akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu yang di Ridhoi oleh Alloh SWT.

Penelitian skripsi ini membahas tentang penerapan Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Usaha Kecil dan Menengah dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan. Penelitian ini mengidentifikasi bentuk, manfaat dan faktor pendorong dan penghambat kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di wilayah kerja PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahandaku Mudjiyanto dan Ibundaku Sri Supartini yang dengan penuh kesabaran dan ikhlas telah mengasuh, membesarkan dan membiayai baik materiil maupun spirituil serta mengalirkan doa-doanya untuk kebahagiaan putrinya di dunia maupun di akhirat.
2. Bapak Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Pembimbing, dan Bapak Drs. Aspan Munadi, MAP selaku Anggota Pembimbing yang telah sabar dan menyempatkan waktu padatnya untuk dapat membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.

3. Pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun yang telah sangat membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Pramita Krismana Putri, yang telah menemani dan memberi spirit dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman penulis: Power Ranger (Gading, Ogin, Haryo), Nesa, Kunit, Febri, Rendra, Nando, mas Jattrick, Rombeng, Cristian, Cete, Akvin, Mbah Wek, anak kos Bendungan Sutami 8b (Bedu, Dipo, Katam), anak pankstian dan teman-teman FIA Publik 2005 serta arek kandang “GeminI” yang selalu membantu dan memberikan semangat serta mengisi hari-hari penulis dalam canda, tawa, dan persahabatan.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu-satu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih perlu adanya koreksi, saran, dan kritikan yang konstruktif dan sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Malang, 3 Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Motto	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Abstrak	vi
Summary	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar gambar	xiv
Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pembangunan	10
2.2 Kemitraan	11
2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)	16
2.4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	18
2.5 Usaha Kecil Menengah	24
2.6 Ekonomi Kerakyatan	29
2.7 Faktor pendorong dan penghambat kemitraan	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1 Fokus Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Situs Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Instrumen Penelitian	40
3.6 Keabsahan Data	40
3.7 Analisa Data	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum	43
4.1.1.1 Sejarah PT Kereta Api Indonesia (Persero)	43

4.1.1.2	PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun	45
4.1.1.3	Kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah	52
4.1.2	Penyajian Data Fokus	59
4.1.2.1	Bentuk Kemitraan yang Dilaksanakan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah	59
4.1.2.2	Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah.	61
4.1.2.3	Manfaat dari Program Kemitraan	79
4.1.2.4	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah	80
4.1.2.5	Indikator Keberhasilan	82
4.2	Pembahasan	86
4.2.1	Bentuk Kemitraan yang Dilaksanakan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah	86
4.2.2	Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah.	88
4.2.3	Manfaat dari Program Kemitraan	93
4.2.4	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah	94
BAB 5 PENUTUP		95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran	96
Daftar Pustaka		97

DAFTAR TABEL

	Hal.
1 Perbedaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif	41
2 Sejarah Perkereta Apian Indonesia	44
3 Perjalanan program kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun	60
4 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur	82
5 Laporan perkembangan mitra binaan	84

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1 Gambar pertumbuhan PDB Riil era krisis moneter	3
2 Gambar struktur organisasi PT KAI DAOP VII Madiun	51
3 Gambar tim PKBL PT KAI DAOP VII Madiun	57
4 Gambar diagram alir program kemitraan	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
1 Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan	99
2 Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan	100
3 Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan	101
4 Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan	102
5 Daftar mitra binaan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun	103
6 Form Cash Flow Dana Kemitraan / Pukk	121
7 Form Aktivitas Program Kemitraan	122
8 Form Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan	123
9 Form Neraca Program Kemitraan	124
10 Form Cash Flow Dana Program Bina Lingkungan	125
11 Form Penyaluran Dana Program Kemitraan Per Wilayah	126
12 Form Kualitas Pinjaman Program Kemitraan Menurut Sektor Usaha	127
13 Form Daftar Kolektibilitas Pinjaman Program Kemitraan	128
14 Form Daftar Pinjaman Dan Pengembalian Dana Program Kemitraan	129
15 Form Perkembangan Mitra Binaan	130
16 Form Penyebab Dan Tindak Lanjut Tunggakan Terhadap Mitra Binaan	131
17 Form Daftar Mutasi Pinjaman Bermasalah (Macet)	132

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh setiap negara di dunia, keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan disegala bidang salah satunya pada sektor perekonomiannya. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan yang terencana, terpadu, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan.

Dewasa ini para ilmuwan dari berbagai jurusan ilmu pengetahuan, pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah dari berbagai tingkatan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. Keadaan seperti ini berkembang setelah Perang Dunia kedua. Sebelum itu sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh berbagai kalangan terhadap pembahasan, analisa dan pelaksanaan pembangunan ekonomi (Sukirno, 1985:5).

Lebih lanjut Sukirno (1985:6) menjelaskan alasan perlunya melakukan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah sebagai berikut:

”Ada beberapa faktor yang dipandang sebagai sebab bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang terpenting hal tersebut merupakan akibat dari berkembangnya cita-cita dari negara berkembang yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju”.

Dengan demikian pembangunan ekonomi negara berkembang merupakan hal yang sangat perlu dan sangat mendesak. Menurut Sukirno (1985:6), manfaat dari pembangunan ekonomi antara lain;

- 1) untuk mengatasi masalah pengangguran,
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
- 3) mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dengan pembangunan ekonomi.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Danies Perdana Kusuma (2006:4), disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dapat dicapai dengan:

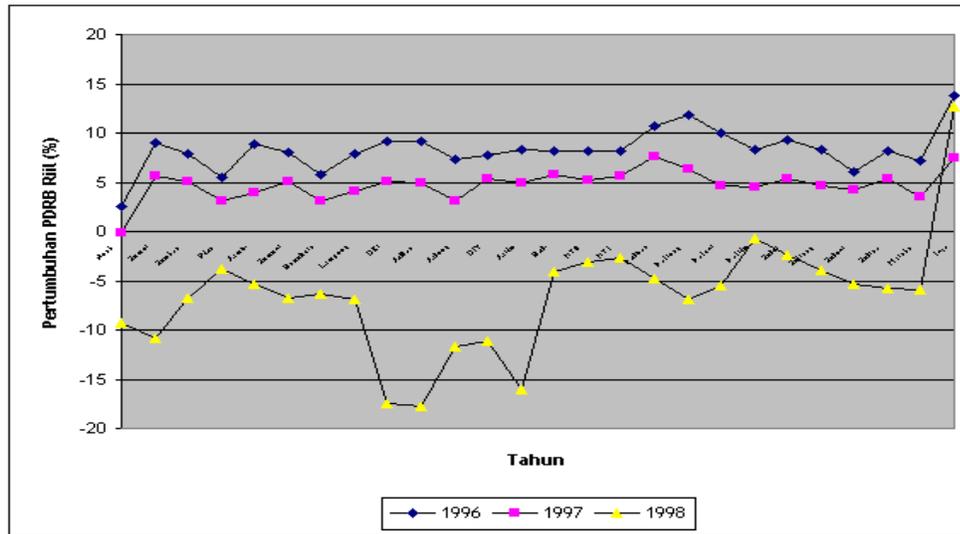
“Lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme

pasar yang berkeadilan serta berbasis Sumber Daya Alam, serta Sumber Daya Manusia yang produktif dan mandiri.”
PROPENAS (2000:40)

Saat ini ekonomi kerakyatan menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi istilah baru dalam wacana pembangunan. Jatuhnya perekonomian Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Berbagai kajian yang dilakukan berhasil menemukan satu faktor kunci yang menyebabkan jatuhnya perekonomian Indonesia yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Karena yang terjadi makin memperlebar antara masyarakat miskin dan kaya. Lapangan kerja yang ada hanyalah untuk kalangan tertentu saja, sedangkan banyak dari lapisan masyarakat menengah kebawah yang tidak memperoleh akses lapangan pekerjaan.

Struktur ekonomi yang tidak seimbang tersebut, sekelompok kecil elit ekonomi yang menurut BPS jumlahnya kurang dari 1% total pelaku ekonomi mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan karenanya mendominasi sumbangan dalam PDB, pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa pasar. Di saat elit ekonomi tersebut mengalami masalah keuangan sebagai akibat mismanajemen dan praktek-praktek yang tidak sehat maka sebagai konsekuensi logisnya berbagai indikator seperti PDB dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemerosotan. Hal ini bisa dilihat dari gambar pertumbuhan PDB riil pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis moneter, yang menggambarkan keadaan perusahaan skala besar pada saat itu tidak mampu bertahan menghadapi krisis sehingga menyebabkan merosotnya PDB.

Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Riil, 1996-1998 (%)



Sumber: BPS (<http://www.bps.go.id/>)

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Riil era krisis moneter

Namun struktur ekonomi yang timpang tersebut ternyata juga merupakan anugrah bagi Indonesia. Sebagian besar pelaku ekonomi yang selama ini posisinya marjinal, informal, tidak mendapatkan fasilitas, justru lebih mampu bertahan berbagai masalah. Para pelaku ekonomi inilah yang sering disebut dengan ekonomi rakyat.

Dalam konteks Indonesia, ekonomi rakyat seringkali dihadapkan secara diametral dengan usaha besar dan konglomerat. Perbedaan ini menggambarkan mengenai adanya dualisme ekonomi di Indonesia. Perbedaan ini juga dipertegas dengan klasifikasi data BPS yang mengelompokkan pelaku ekonomi Indonesia kedalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah usaha besar dan konglomerat sedangkan yang kedua adalah usaha kecil, menengah, dan koperasi. (Bambang Ismawan, 2002: Th. I - No. 1 -Maret)

Apabila perhatian lebih jauh ditujukan kepada sektor kedua, yaitu usaha kecil, menengah, dan koperasi yang jumlahnya menurut BPS sekitar 36 juta usaha, pada kenyataannya bagian terbesar yaitu sebesar 34 juta jiwa adalah usaha mikro, baru diikuti oleh usaha kecil, koperasi, dan usaha menengah. Sektor ini menyerap 99,6% tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian kalau kita membicarakan ekonomi rakyat, perlu dijadikan catatan bahwa sebagian terbesar dari pelaku ekonomi di dalamnya adalah usaha mikro yang menyerap tenaga kerja

sangat besar dan secara hipotetis menjangkau lebih dari 136 juta jiwa. Di samping itu perlu kita tahu dalam kenyataannya ekonomi rakyat selama ini hidup dan berkembang dalam situasi tertekan, lemah, dan tidak diuntungkan.

Ekonomi kerakyatan adalah upaya memberdayakan (kelompok/satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan dijelaskan sebagai kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Landasan hukum untuk ekonomi kerakyatan ini ada pada Proppenas dalam UU no. 25/2000. Implementasi ekonomi kerakyatan yang paling sesuai saat ini adalah koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut Aloysius Gunadi Brata (2003: Th. II - No. 8 - November), setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UKM.

"Alasan pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar."

Akan tetapi, dalam kegiatan usaha kecil dan menengah juga terdapat masalah yang bisa menyulitkan UKM untuk bisa berkembang dengan baik. Menurut Sulaeman (2004:117), secara umum permasalahan utama yang dialami UKM ada tiga hal, yaitu:

- 1) Kurang permodalan
- 2) Pasar yang sangat bersaing
- 3) Sulit mendapatkan bahan baku

Oleh karena itu, agar UKM dapat berkembang dengan baik maka perlu adanya bantuan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Salah satu strategi dalam mengembangkan UKM adalah dengan kemitraan usaha (Partomo, 2002:30).

Pengembangan ekonomi kerakyatan, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan secara mandiri. Sebagai langkah yang diharapkan bisa mengatasi masalah dan

menyelamatkan keberadaan ekonomi kerakyatan dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus berpihak pada rakyat kecil. Karena pada hakikatnya ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang demokratis, menunjuk pada asas ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sehingga ekonomi rakyat harus mendapat dukungan pemihakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah.

Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan sebagai upaya dari pemerintah untuk membantu pertumbuhan usaha-usaha kecil agar nantinya dapat berkembang lebih besar. Salah satu kebijakan untuk mendukung keberadaan ekonomi kerakyatan ini ialah melalui pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar maupun dengan usaha-usaha milik negara (BUMN). Maksud dari kebijakan ini adalah agar nantinya para pelaku ekonomi kerakyatan yang dibina dapat didorong laju perkembangannya menjadi bentuk usaha yang lebih baik serta mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.

PT KAI (Kereta Api Indonesia) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang angkutan darat. Selain kontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak, PT KAI juga bertanggungjawab atas kemajuan dan perkembangan perekonomian masyarakat, dalam hal ini yaitu usahawan kecil dan menengah yang ada di Indonesia khususnya di daerah. Bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) seperti yang terdapat pada PT KAI DAOP VII Madiun.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba yang diperkenankan adalah sebesar maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Pelaksanaan Pasal 2 undang-undang Nomor 19 Tahun

2003 tersebut adalah dilaksanakannya PKBL oleh seluruh BUMN. PKBL merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini dimaksudkan untuk membantu para usaha kecil dengan pemberian pinjaman modal usaha agar usaha kecil ini bisa terus berkembang. Jadi bukan semata sebagai pelindung BUMN dalam rangka mengembangkan konglomerasi mereka, melainkan sebagai upaya untuk membantu para usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses permodalan.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN ini mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989. Sebelumnya, program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan dari kondisi yang telah dipaparkan diatas, serta memandang begitu pentingnya upaya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui BUMN untuk kelangsungan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dimasa yang akan datang, terutama dalam rangka menghadapi persaingan pada era perdagangan bebas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul sebagai berikut:

“Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun dengan Usaha kecil dan Menengah dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan.”

1.2 Perumusan Masalah

Seperti yang telah diketahui, upaya pemerintah memajukan potensi usaha kecil telah dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan untuk mendukung

pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut salah satunya dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Bentuk program ini ialah melalui pembinaan pola kemitraan dan pemberian kredit berupa pinjaman lunak antara BUMN dengan usaha kecil yang ada. Dengan pembinaan ini diharapkan akan bisa menumbuh kembangkan potensi usaha kecil yang ada, agar nantinya dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan mapan.

Kondisi yang ada ialah banyaknya usaha kecil yang sekedar mampu bertahan dari kesulitan ekonomi yang terjadi, namun tidak memiliki kemampuan yang baik untuk berkembang lebih maju, walaupun peluang yang ada cukup baik. Sementara, pembinaan pola kemitraan yang telah dijalankan diharapkan lebih mampu memberikan dukungan yang optimal bagi kalangan pengusaha kecil dalam pengembangan usahanya.

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah di daerah operasional Madiun dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan?
- 2) Apakah manfaat yang diperoleh oleh PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun dan usaha kecil dan menengah dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?
- 3) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat kemitraan PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpedoman pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemitraan PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manfaat dari kemitraan PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah bagi kedua belah pihak.
- 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam program kemitraan PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pemerintah mengenai ekonomi kerakyatan.
- 2) Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah.
- 3) Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pemahaman tentang prospek-prospek perkembangan ekonomi kerakyatan.
- 4) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada masalah ini dan ingin mengembangkan permasalahan dimasa yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penelitian ini, dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, serta sistematika penulisan.

BAB 2: KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan konsep dasar mengenai yang menjadi landasan teori dari penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini membicarakan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Mengemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi saran yang dihasilkan dari penelitian ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

2.1.1 Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu : pertama, tentang administrasi dan kedua, tentang pembangunan. Menurut Siagian (1970;2)

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa(nation-building).”

Sedangkan menurut Riggs (1986:75), “Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melakukan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.”

2.1.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjoyo (1974:58) bahwa “ Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dibidang lain.”

Menurut Sukirno (1985:13) bahwa “pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.” Sehingga jika dilihat dari definisi pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan;

- 1) Suatu proses, yang berarti perubahan yang terus menerus
- 2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
- 3) Kenaikan pendapatan perkapita harus suatu masyarakat meningkat dalam waktu yang panjang

Disamping itu perlu disadari bahwa dalam menciptakan pembangunan ekonomi, masyarakat harus rela berkorban, baik secara materiil maupun dalam

bentuk yang lainnya. Mengutip pendapat Lewis dalam Sukirno (1985:16), "Seperti juga berbagai hal lainnya, ada biayanya." yang berarti dalam pembangunan ekonomi, disamping memberikan manfaat pada masyarakat, untuk menciptakan masyarakat harus pula membuat pengorbanan. Pengorbanan tersebut pada umumnya berupa perombakan terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah dalam suatu negara.

2.2 Kemitraan

2.2.1 Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari prespektif etimologis diadaptasi dari kata partnershi, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu atau kompayon". Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. (Sulistiyani, 2004:129)

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- 1) Ada dua belah pihak atau lebih
- 2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- 3) Ada kesepakatan
- 4) Saling membutuhkan

Pengertian kemitraan menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 pada Bab I dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kerjasama ini tidaklah terujud dengan sendirinya saja, akan tetapi harus dibangun dengan sadar dan terencana, baik ditingkat nasional, maupun ditingkat lokal yang lebih rendah. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional

adalah wahana utama untuk meningkatkan kemampuan wirausaha nasional, karena ujung tombak dalam menghadapi era ekonomi terbuka dan perdagangan bebas adalah wirausaha nasional (Marbun dalam Eko Nurminto dan Arman Hakin Nasution, 2004:49).

Pengertian kemitraan (*partnership*) dapat dilihat dalam beberapa dimensi, dapat dilihat dari dimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam dimensi ekonomi, Thoby Mutis mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul (mutual) (Mutis dalam Setiawan, 2004: 32).

Mohammad Jafar Hafsa, mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Jafar Hafsa dalam Setiawan, 2004:35).

2.2.2 Kemitraan Dalam Prespektif Administrasi Negara

Menurut Admosudirdjo (1997:37), "*Partnerships in public administration reform for economic transformation are present in Indonesia at various levels of government and take many forms, depending on the goals to be achieved, the nature of the programs, the personality of the partners, and the surrounding situation.*" Selanjutnya Admosudirdjo (1997:28-29), bentuk dari kemitraan administrasi adalah:

"There are many forms of partnerships arranged through the structuring and designing of Project Organizations, which may be classified into the following categories, i.e.:

- 1. Partnership between Ministries or their Directorates-General, through so-called Proyek Bersama (Joint Projects), e.g. Irrigation projects, Road and Fly-over Building projects, which create housing complexes, real estate projects, resettlement of city and village people, cause social and cultural problems by the change of patterns of community life.*
- 2. Partnership between a Ministry and a so-called LPND (non-ministerial central government agency), e.g. Education and Training projects of less-developed villages (desa tertinggal), which in the beginning caused tremendous social and cultural problems because of the fast change in outlook on life, particularly among the young generation (70 per cent of the population is below 25 years of age), thus creating communication gaps with the older generations who stick to their adapt (customs and usages)*

and old traditions. These education and training programs, how noble they may be, create 'marginal men', frustrated by a sudden large scale change in world outlook.

3. Partnership between BUMN's (State Owned Companies), e.g. Telecommunication projects, which are parts of the social and economic infrastructure to be built and completed before the year 2000.

4. Partnership between Local Government and BUMN's, e.g. Listrik Masuk Desa (Village Electrification) projects, Fertilizers Distribution projects, Cheap Loans to Farmers' projects. The joint activities are not confined to technicalities alone, but cover a wide range of forms of cooperation to tackle the problems, which derive from the social, economic and political impacts of those projects. Electrification of a village, for instance, creates new home activities, change the pattern of family life, and even change the daily diet of the village people.

5. Partnership between Ministries and Private Companies, e.g. Mid Kalimantan 2 million hectares Rice Cultivation projects, which involve enormous financial and agritechnological problems, but will also need resettlement of people, local as well as transmigrants from Java.

6. Partnership between a Ministry and Village Cooperatives, e.g. Village Horticulture Development projects, including the Education and Training of the village people concerned in modern horticultural technology, in post-harvest engineering, new marketing patterns, seed growing, etc.

7. Partnership between a BUMN, a State-owned Bank, and Groups of Farmers, e.g. the so-called Perkebunan Inti Rakyat or PIR (NES, nucleus estate) projects, for rubber, palm oil, land fishery, industrial forest, cotton, cocoa, cattle fattening, etc. These projects raise the income of farmers, but change at the same time their home life patterns, and family values.

8. Partnership between a Local Government, Private Company, and a Village, e.g. the Tapioca project, Sugar cane project, Sea weeds project, Cashew nut project, etc. One of the subtle problems of these projects is the financial side, namely, how to protect the interest of the people so that they get a fair share. Most of them have to learn to work and to live with a market economy if they really want to benefit from these projects.

9. Partnership between Villages, e.g. Joint Exploitation of Springs for clean water distribution, Joint Village Electricity project, Joint Irrigation (Bali Subak System), etc. Because of the existence of the traditional Subak watering organization in Bali there are no water distribution conflicts. But in other areas, for instance in West Java region, a Mitra Cai (mitra = partner; cai = water) organization network has to be created, with all its social and cultural consequences."

2.2.3 Model Kemitraan

Seperti yang dijelaskan oleh Sulistiyani (2004:130) model dari kemitraan yang dikembangkan berdasar dunia organisme antara lain;

- 1) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- 2) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik

- 3) *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan atau pengembangan

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramociun. Dua paramociun melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melekuakn model ini.

Selain model yang dijelaskan diatas, Sulistiyani (2004:131) menjelaskan tentang model kemitraan yang dikembangkan berdasarkan kehidupan organisasi pada umumnya, di antaranya adalah;

- 1) *Subordinate union of partnership*
- 2) *Linear union of partnership*
- 3) *Linier collaborate of partnership*

Kemitraan *subordinate union of partnership*, terjadi di antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak

seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya.

Kemitraan *linear of partnership* adalah kemitraan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi yang memiliki persamaan relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

Kemitraan dengan melalui kerjasama linear selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra, yang menjadi tekanan utama adalah visi-visi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada dalam garis lurus dan tidak saling subordinasi.

2.2.4 Pola Kemitraan Usaha.

Menurut Partomo (2002:31-32), pola kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah, antara lain:

- 1) Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar yang di dalamnya UKM bertindak sebagai inti dan UKM sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan modal, bimbingan teknis, dan pemasaran hasil produksi.
- 2) Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar, di mana UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
- 3) Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara UKM dan usaha besar, di mana usaha besar memasarkan hasil produksi UKM dan UKM memasok kebutuhan yang diperlukan usaha besar sebagai mitranya.
- 4) Pola waralaba adalah hubungan kemitraan di mana usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusinya kepada penerima waralaba (UKM) dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- 5) Pola keagenan adalah hubungan kemitraan di mana UKM memberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha besar sebagai mitranya.

2.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.3.1 *Pengertian dan Jenis Corporate Social Responsibility*

Ada beraneka ragam definisi *Corporate Social Responsibility* dan sulit diseragamkan. Makna Ani Marlia dalam Susiloadi (2008:124) mendefinisikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Menurut Achda (2006:4), CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Komisi Eropa mendefinisikan CSR sebagai "*essentially a concept whereby companies decide voluntary to contribute to better society and a cleaner environment*". Definisi ini menekankan bahwa CSR adalah suatu konsep yang menunjukkan bagaimana perusahaan secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. (Susiloadi, 2008:125)

Jadi disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa CSR/Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya.

2.3.2 *Manfaat Corporate Social Responsibility*

A.B. Susanto dalam Susiloadi (2008:126) mengemukakan bahwa dari sisi perusahaan terdapat 6 (enam) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR.

"Pertama, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen consumer

goods yang beberapa waktu yang lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya. Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Kelima, meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSRnya sehingga memiliki reputasi yang baik. Keenam, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. ”

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. CSR dapat memberi banyak keuntungan yaitu :

- 1) Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengimplementasikan program CSR menunjukkan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham;
- 2) Menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar, karena sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait;
- 3) Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari pembangunan citra perusahaan (*corporate image building*). Social Marketing akan dapat memberikan manfaat dalam pembentukan *brand image* suatu

perusahaan dalam kaitannya dengan kemampuan perusahaan terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungan selain memiliki produk yang berkualitas tinggi. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap volume unit produksi yang terserap pasar yang akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang besar terhadap peningkatan laba perusahaan. Kegiatan CSR yang diarahkan memperbaiki konteks korporat inilah yang memungkinkan alignment antara manfaat sosial dan bisnis yang muaranya untuk meraih keuntungan materi dan sosial dalam jangka panjang.

2.4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.4.1 Pengertian dan Pembagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Di Indonesia, pengertian perusahaan negara (yang sekarang lebih dikenal dengan BUMN) dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-undang No. 19/prp/1960, yang menyebutkan, "Perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya seluruhnya merupakan negara RI, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang."

Selanjutnya pengertian BUMN juga dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.001/1989, dimana BUMN menurut keputusan ini adalah

- a. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara
- b. Badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN:
 1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
 2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
 3. BUMN yang merupakan Badan Usaha patungan dengan swasta nasional atau asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Mengenai perusahaan negara, W. Friedman seperti yang dikutip oleh Ibrahim (1997:10), membedakan perusahaan negara menjadi tiga bentuk yaitu :

Departemental Government Enterprise, Statutory Public Corporation dan Comercial Companies.

Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan ketiga bentuk perusahaan negara itu adalah :

1. **Departemental Government Enterprise** adalah perusahaan negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan, bergerak dalam bidang public utilities.
2. **Statutory Public Corporation** adalah perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan departement government enterprise, hanya dalam hal manajemen lebih otonom dan bidang usahanya tetap public utilities.
3. **Commercial Companies** adalah perusahaan negara yang merupakan campuran dengan swasta dan berlaku hukum privat.

Selanjutnya Henry Campbell seperti yang dikutip oleh Ibrahim (1997:17), menyatakan :

“Dalam public utilities ada hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terus menerus, secara efisien dan membayar dengan harga yang sepantasnya hak tersebut harus terwujud dengan tersedianya pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. Bilamana diperlukan hak itu dapat dituntut dengan paksa secara hukum untuk dilaksanakan.”

Sedangkan berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1998, penggolongan BUMN berdasarkan badan usahanya adalah :

- a. Usahanya bersifat tugas-tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu.
- b. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara.
- c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis.
- d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.

Pengelompokkan bidang usaha dalam praktiknya menurut Christian Wibisono yang dikutip oleh Ibrahim (1997:107), dibedakan antara public utilities

yang meliputi : Pos, Telekomunikasi, Listrik, Gas, Kereta api, dan Penerbangan. Sedangkan industri vital strategis meliputi : Minyak, Batu bara, Besi baja, Perkapalan dan Otomotif, kemudian menjadi bidang bisnis.

2.4.2 Bentuk BUMN

1) PERJAN (Departemen Agency)

Perjan/Perusahaan Jawatan merupakan perusahaan yang dipergunakan untuk administrasi penyelenggaraan bagi pelayanan jasa monopoli secara nasional, sehingga masih terdapat pengawasan sepenuhnya dari pemerintah dan sedikit operasi otonomi yang dapat mengurangi inisiatif dan fleksibilitas perusahaan. Ciri-ciri pokoknya adalah :

- a. Makna usaha adalah public service, artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat usahanya dijalankan dengan memegang syarat-syarat efisien, efektifitas dan ekonomis dalam manajemen perusahaan dan pelayanan kepada umum atau masyarakat yang baik.
- b. Bagian dari departemen/Direktorat Jendral/Direktorat Pemerintah Daerah.
- c. Mempunyai hukum publik, apabila melakukan tuntutan atau dituntut, maka kedudukannya sebagai pemerintah atau ijin pemerintah.
- d. Hubungan usaha antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani, meskipun terdapat subsidi tetapi harus ada perincian. Subsidi harus dilengkapi dengan bukti-bukti tanda pembayaran maupun penerimaan sehingga jelas penggunaannya.
- e. Dipimpin oleh seorang Kepala, merupakan bawahan dari suatu Departemen/Direktorat Jendral/Direktorat Pemerintah Daerah.
- f. Mempunyai dan memperoleh fasilitas, seperti badan/lembaga pemerintah lainnya.
- g. Status pegawai adalah pegawai negeri.
- h. Pengawasan dilakukan secara hierarki maupun secara fungsional, seperti bagian-bagian dari suatu departemen/pemerintah daerah (Ibrahim, 1997:120-121).

2) PERUM/Perusahaan Umum (public corporation).

Perum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki

negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (produksi, konsumsi, dan distribusi). Prinsip usaha dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan economy cost, accounting principles dan management effectiveness serta bentuk pelayanan (service)
- b. Berstatus badan hukum diatur berdasarkan undang-undang.
- c. Bergerak dibidang jasa-jasa vital (public utilities). Pemerintah boleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat public utility tidak perlu diatur, disusun, atau diadakan perusahaan negara.
- d. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergarapseperti perusahaan swasta, mengadakan perjanjian, kontrak, dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
- e. Dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata.
- f. Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi.
- g. Secara finansial harus dapat berdiri sendiri kecuali ada politik pemerintah mengenai tarif dan harga, akan diatur melalui subsidi pemerintah.
- h. Dipimpin oleh seorang direksi, status kepegawaian sebagai pegawai perusahaan negara yang diatur dalam ketentuan sendiri, diluar ketentuan pegawai negeri.
- i. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan cara pertanggungjawabannya, pengawasan diatur secara khusus sesuai dengan Undang-undang pembentukannya.
- j. Tarif dapat ditentukan oleh pemerintah karena berupa public utility dan apabila dipandang perlu untuk kepentingan politik.
- k. Laporan tahunan perusahaan menurut neraca untung rugi dan neraca kekayaan yang disampaikan kepada pemerintah (Ibrahim, 1997:121-122)

Perum sering disebut sebagai otorita yaitu badan yang bertugas untuk menyelenggarakan usaha-usaha pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan

potensi-potensi demi kemanfaatan dan kemakmuran bangsa. Namun masih terdapat kecenderungan untuk mengurangi otonomi dari perusahaan, sehingga dengan keadaan ini menyebabkan perusahaan menjadi alat pemerintah belaka dan menimbulkan ketidakefisiensian serta menjadi beban anggaran negara.

3) PERSERO/Perusahaan Perseroan (public/statecompany).

Persero merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995, yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung (Muljono, 1999:2). Ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Makna usahanya untuk memupuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif dan ekonomis, menggunakan prinsip cost accounting efektivitas manajemen dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperoleh laba.
- b. Status adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas.
- c. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
- d. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, dimungkinkan adanya joint atau mixed enterprise dengan swasta nasional atau asing dan adanya penjualan saham perusahaan milik negara.
- e. Tidak memiliki fasilitas negara.
- f. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham, intenditas medezeggenschap terhadap perusahaan bergantung besarnya jumlah saham (modal) yang dimiliki berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan pemilik lainnya (Ibrahim, 1997:122-123).

2.4.3 Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam penelitian di lapangan ditemukan bahwa BUMN melaksanakan multi fungsi. Adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh BUMN adalah sebagai berikut :

- 1) Agen pembangunan, artinya BUMN bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan, orientasinya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau. BUMN juga diharapkan menjadi pioner

dalam hal kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta serta melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

- 2) Pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan, artinya BUMN diharapkan mampu memberikan kemanfaatan umum baik berupa barang maupun jasa kepada masyarakat dan melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dalam hal penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Instrumen penjaga harga, artinya BUMN dipertahankan dalam tingkat persaingan yang ketat dengan swasta karena ingin dipakai sebagai instrumen penjaga harga, kalau pasar mengendur dan berkembang menjadi bentuk monopolistik maka BUMN bisa berperan untuk menjual barang dan harga murah.
- 4) Menghasilkan laba/keuntungan, artinya BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan perekonomian negara dan memberikan sumbangan pendapatan bagi kas negara.
- 5) Benteng pertahanan terhadap persaingan ekonomi global, artinya dalam kondisi globalisasi ekonomi dan dalam meredam arus investasi asing yang sangat dominan, BUMN dan swasta nasional tak ada yang mampu diharapkan mampu menjadi salah satu potensi untuk mengimbangi konstelasi perekonomian dunia.

Menurut peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1983, dinyatakan bahwa maksud dari pada keberadaan BUMN adalah :

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- 2) Mengadakan pemupukan keuntungan atau pendapatan.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi antara lain dengan menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk jasa yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai.

- 6) Turut aktif dalam memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah.
- 7) Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Sedangkan dalam pasal 2 undang-undang No. 19 tahun 2003 BUMN maksud dan tujuan pendiriannya adalah :

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- 2) Mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 3) Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2.5 UKM

2.5.1 Pengertian

1) Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha kecil

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;

- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

2) Pengertian Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ciri-ciri usaha menengah

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2.5.2 Kinerja UKM di Indonesia

1) Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja

UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Argumen ini didasari kenyataan bahwa, di satu pihak, jumlah angkatan

kerja di Indonesia sangat berlimpah mengikuti jumlah penduduk yang besar, dipihak lain usaha besar tidak sanggup menyerap semua pencari kerja. Ketidaksanggupan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif padat modal, sedangkan UKM padat karya. Kedua, pada umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang cukup, sedangkan UKM khususnya usaha kecil sebagian pekerjanya berpendidikan rendah. (Tambunan, 2002;21)

2) Kontribusi Terhadap PDB

Dalam bentuk kontribusi terhadap pembantuan PDB (atas harga berlaku), usaha kecil menyumbang sekitar 40% tahun 2000 di banding 38% pada tahun 1987. kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, bukan dari sektor industri manufaktur. Struktur kontribusi PDB ini menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia masih lebih kuat di sektor pertanian bukan sektor industri seperti Jepang, Korea selatan dan Taiwan. (Tambunan, 2002;26)

2.5.3 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Strategi yang diterapkan dalam upaya mengembangkan UKM di masa depan terlebih dalam menghadapi pasar bebas di tingkat regional dan global, sebaiknya memperhatikan kekuatan dan tantangan yang ada, serta mengacu pada beberapa hal sebagai berikut (Suhendar Sulaeman, 2004):

- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan
- 2) Mempermudah perijinan, pajak dan retribusi lainnya,
- 3) Mempermudah akses pada bahan baku, teknologi dan informasi
- 4) Menyediakan bantuan teknis (pelatihan, penelitian) dan pendampingan dan manajemen (SDM, keuangan dan pemasaran) melalui Business Development Service Provider (BDSP).
- 5) Secara rutin BDSP melakukan pertemuan, lokakarya model pelayanan bisnis yang baik dan tepat
- 6) Mendorong BDSP untuk masingmasing memiliki keahlian khusus (spesialis), seperti: pengembangan SDM, keuangan, pemasaran. Ini terutama diperlukan

bagi upaya pelayanan kepada usaha menengah yang pasarnya regional dan global

- 7) Menciptakan sistem penjaminan kredit (*financial guarantee system*) yang terutama disponsori oleh pemerintah pusat dan daerah
- 8) Secara bertahap dan berkelanjutan mentransformasi sentra bisnis (parsial) menjadi kluster bisnis (sistemik).

Seperti yang diungkapkan Sulistiyani (2004:81), "dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan yang ingin kita capai, maka pemberdayaan UKM dikmaksudkan agar UKM menjadi kekuatan perekonomian nasional". Dalam kaitan ini arah pembangunannya adalah;

- 1) UKM memiliki posisi dan peran yang seimbang dengan usaha nasional lainnya.
- 2) UKM menjadi kekuatan dan soko guru perekonomian nasional dalam mekanisme pasar yang terkelola
- 3) UKM menjadi kekuatan utama dalam perdagangan dalam negeri serta menguasai agribisnis, industri, manufaktur dan jalur distribusi

Selain itu Sulistiyani (2004:84) juga menjelaskan,

"adapun kebijakan dasar dalam pembangunan UKM adalah meningkatkan kualitas SDM UKM melalui peningkatan wawasan dan prakarsa dalam mengembangkan bisnis serta menetapkan peraturan perundang-undangan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan."

Langkah-langkah operasional yang ditempuh untuk penumbuhan usaha yang kondusif menyangkup aspek

- 1) Kebijakan persaingan sehat dan pengurangan distorsi pasar
- 2) Kebijakan ekonomi yang memberikan peluang UKM yang mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi
- 3) Kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan

Selanjutnya dukungan perkuatan, meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM
- 2) Peningkatan penguasaan teknologi
- 3) Peningkatan penguasaan informasi
- 4) Peningkatan penguasaan permodalan

- 5) Peninffkatan penguasaan pasar
- 6) Pengoptimalan organisasi dan manajemen
- 7) Pencadangan tempat usaha
- 8) Pencadangan bidang usaha

Dengan tetap mengacu pada kebijaksanaan dasar dan operasional sebagai mana disebutkan di atas, penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UKM melalui pembinaan dan pengembangan terpadu, terarah dan berkesinambungan semakin relevan dan perlu ditingkatkan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, program yang ditempuh antara lain

- 1) Restrukturisasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan koperasi dan UKM; diantaranya mencabut Inpres no. 4/1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD dan penghapusan tata niaga cengkeh melalui BPPC. Dalam kaitan ini, sudah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian yang ininya memberikan kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan perekonomian.
- 2) Program peningkatan produksi pangan
- 3) Program distribusi sembako
- 4) Program pembiayaan alternatif bagi koperasi dan UKM

Selain program jangka pendek, untuk jangka menengah dan jangka panjang program yang akan dikembangkan antara lain;

- 1) Mencegah konsentrasi aset ekonomi produktif di tangan beberapa gelintir orang dan memperluas aset produktif di tangan rakyat
- 2) Meningkatkan partisipasi dan advokasi rakyat dalam proses pembangunan
- 3) Ketersediaan dana yang cukup untuk pengembangan koperasi dan UKM
- 4) Mengembangkan basis ekonomi wilayah di tingkat kabupaten dan pedesaan
- 5) Mempercepat proses pembangunan dan *basic need* ke sektor modern yang mempunyai nilai tambah
- 6) Menerapkan strategi, pembangunan dengan pendekatan *federation, improving dan enabling*

2.6 Ekonomi kerakyatan

2.6.1 Definisi ekonomi kerakyatan

Dalam wacana teori ekonomi, istilah ekonomi rakyat memang tidak dapat ditemui. Hal ini memang karena ekonomi rakyat sebagai sebuah pengertian bukan merupakan turunan dari mazhab atau school of thought tertentu melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi dimana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh usaha dan konglomerat terdapat sektor informal dimana sebagian besar anggota masyarakat hidup.

Menurut Mubyanto (2002: Th. I - No. 1 - Maret), "Ekonomi kerakyatan adalah kancan kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional." Dalam literatur ekonomi pembangunan ia disebut sektor informal, underground economy, atau ekstralegal sector. Alfred Marshall bapak ilmu ekonomi Neoklasik (1890) dalam Mubyanto (2002: Th. I - No. 1 - Maret) memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai berikut, "*Economics is a study of men as they live and move and think in the ordinary business of life. But it concerns itself chiefly with those motives which affect, most powerfully and most steadily, man's conduct in the business part of his life.*"

Ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi di mana aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada warga negara. Secara definisi ekonomi kerakyatan adalah:

- 1) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan output perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.
- 2) Tata ekonomi dapat menjamin pertumbuhan output secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi jasa dan barang pada tingkat pareto optimum. Tingkat pareto optimum adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal dan tidak ada faktor produksi yang menganggur.

- 3) Tata ekonomi yang dapat menjadi pareto optimum adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh dan tenaga modal secara penuh.
- 4) Tata ekonomi dimana income individu masyarakat, penerimaan dari deviden atau bagi hasil sisa usaha, tingkat sewa modal dan jumlah tabungan yang disewakan. Dengan demikian dalam tata ekonomi kerakyatan, masyarakat bukan sebagai buruh dalam perekonomian tetapi juga memiliki saham disektor produksi.

Dainy Tara dalam Fredrick Benu (2002:Th. I - No. 10 - Desember) menjelaskan bahwa "ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha." Dalam ruang Indonesia, maka kata rakyat dalam konteks ilmu ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, menejemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat secara kasar dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder - pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas dan subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dan semacamnya.
- 2) Kegiatan-kegiatan tersier - transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.
- 3) Kegiatan-kegiatan distribusi - pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya.
- 4) Kegiatan-kegiatan jasa lain - pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya. (Keyt Hart dalam Bambang Ismawan,2002: Th. I - No. 1 –Maret)

2.6.2 Tujuan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai:

- 1) perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 ayat 1),
- 2) perwujudan konsep Trisakti (berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan),
- 3) perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara (pasal 33 ayat 2), dan
- 4) perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).

Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah untuk:

- 1) Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- 3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
- 4) Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional

2.6.3 Karakteristik Ekonomi Kerakyatan

Sebagai sebuah entitas ekonomi yang cakupannya sangat besar dan luas, karakteristik yang dimiliki ekonomi rakyat sangat beragam, tergantung dari jenis kegiatan yang dimaksud. Meskipun demikian, menurut Bambang Ismawan (2002: Th. I - No. 1 -Maret) menjelaskan beberapa karakteristik dasar sebagai berikut;

- 1) **Informalitas.** Sebagian besar ekonomi rakyat bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan (legal and regulatory framework) yang ada. Ketiadaan maupun kelemahan aturan yang ada atau ketidak mampuan pemerintah untuk mengefektifkan peraturan yang ada menjadi ruang yang membuat ekonomi rakyat bisa berkembang. Beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah dalam kenyataannya justru dapat mematikan ekonomi rakyat seperti terlihat pada kasus yang menjadi persoalan nasional yaitu pengaturan tata niaga cengkeh dan jeruk di Kalimantan Barat. Hal ini untuk sebagian memang benar karena informalitas ekonomi rakyat menyebabkan mereka tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal dan terpaksa harus berhubungan dengan sumber pinjaman informal yang mengenakan bunga

sangat tinggi. Pada sisi lain seperti diungkap diatas, formalisasi ekonomi rakyat juga menyimpan bahaya.

- 2) **Mobilitas.** Aspek informalitas dari ekonomi rakyat juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani. Berbagai kebijakan pemerintah dapat secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu aktifitas ekonomi rakyat. Dalam merespon kondisi yang demikian, sektor ekonomi rakyat merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila pada aktifitas ekonomi tertentu terdapat banyak peluang maka dengan segera akan banyak pelaku yang menerjuninya. Sebaliknya apabila terjadi perubahan yang mengancam keberlangsungan jenis usaha tertentu maka dengan segera para pelakunya akan berpindah ke jenis usaha yang lain. Situasi ini tentu saja tidak terjadi dengan aktifitas primer seperti pertanian dimana para pelakunya jarang meninggalkan aktifitas pertaniannya. Mekanisme yang dikembangkan untuk menjawab tantangan ekonomi akibat berbagai situasi eksternal adalah melakukan diversifikasi aktifitas ekonomi pada bidang-bidang off-farm.
- 3) **Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga.** Salah satu karakteristik lain adalah bahwa dalam satu keluarga terutama yang berada pada strata bawah umumnya keluarga tersebut melalui anggotanya terlibat pada lebih dari satu aktifitas ekonomi yang dapat digolongkan sebagai ekonomi rakyat. Mudah dipahami mengapa ini terjadi. Ketidakamanan dan keberlanjutan yang sulit diramalkan dalam ekonomi rakyat membuat pelakunya harus membuat beberapa alternatif yang dapat menggantikan apabila satu aktifitas ekonomi tidak terpaksa berhenti. Apabila tidak terjadi sesuatu maka akumulasi keuntungan pendapatan dari beberapa aktifitas ekonomi sangat mereka butuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.
- 4) **Kemandirian.** Salah persepsi yang berkembang di masyarakat tentang ekonomi rakyat membuat berbagai pihak baik secara sengaja maupun tidak membatasi interaksi dengan sektor ekonomi rakyat. Dari pihak pemerintah, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi rakyat masih terus berbentuk proyek baik yang menggunakan label penanggulangan kemiskinan maupun pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dari lembaga keuangan

sebagai contoh yang lain, dengan berbagai peraturan dan prinsip kehati-hatian (prudentialitas) membatasi kemungkinan berhubungan dengan sektor ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat masih selalu diyakini sebagai “*unbankable*” dan “*high risk*”, suatu keyakinan yang perlu dikritisi mengingat pengalaman yang terjadi dengan sektor usaha besar dan konglomerat beberapa tahun terakhir.

- 5) **Hubungan dengan sektor formal.** Meskipun ekonomi rakyat dilekatkan dengan predikat informalitas, dalam kenyataannya ekonomi rakyat memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor formal. Hubungan yang dapat disebut sebagai “*the dark side of the formal sector*” ini karena seringkali hubungan ini tidak diakui karena berarti sektor formal bekerja sama dengan entitas yang “illegal” mengambil wujud konkrit seperti: penggunaan penjual koran eceran oleh berbagai perusahaan penerbitan, penyediaan makanan murah oleh warung tegal bagi para pekerja di berbagai perusahaan maupun pabrik, penggunaan pedagang eceran di kampung-kampung untuk menyalurkan berbagai produk perusahaan maupun pabrik. Berbagai contoh yang lain masih dapat dipaparkan, namun satu hal yang jelas adalah ekonomi rakyat dengan satu dan lain cara secara nyata memiliki hubungan dan bahkan mendukung sektor formal.

Selain itu terdapat ciri yang lain dalam ekonomi kerakyatan, diantaranya;

- 1) Pembangunan harus ditunjukkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok.
- 2) Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasis ekonomi domestik pada daerah tingkat dua (kabupaten/kodya)
- 3) Tingkat kemandirian tinggi
- 4) Adanya kepercayaan diri dan kesetaraan
- 5) Meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan
- 6) Partisipatif
- 7) Adanya persaingan sehat
- 8) Keterbukaan/demokrasi
- 9) Pemerataan yang berkeadilan
- 10) Didukung industri yang berbasis sumber daya alam. (Prawirokusumo, 2001:4)

2.6.4 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UKM dan Koperasi adalah: keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya (Asy'arie, 2001).

Komitmen keberpihakan pemerintah pada UKM dan Koperasi di dalam perspektif ekonomi kerakyatan harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebut di atas. Program pengembangan ekonomi rakyat memerlukan adanya program-program operasional di tingkat bawah, bukan sekedar jargon-jargon politik yang hanya berada pada tataran konsep. Hal ini perlu ditegaskan, agar pembahasan tentang ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada suatu konsep, tetapi perlu ditindalajuti dengan pengembangan program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil.

Pada era otonomi saat ini, konsep pengembangan ekonomi kerakyatan harus diterjemahkan dalam bentuk program operasional berbasiskan ekonomi domestik pada tingkat kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan pada era otonomi saat ini tidak harus ditejemahkan dalam perspektif teritorial. Tapi sebaiknya dikembangkan dalam perspektif regionalisasi yang di dalamnya terintegrasi kesatuan potensi, keunggulan, peluang, dan karakter sosial budaya.

Menurut Prawirokusumo (2001:xi) "paling tidak ada dua program untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, yaitu program kewirausahaan dan program kemitraan".

1) Pengembangan kewirausahaan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing UKM sebagai salah satu perwujudan dari ekonomi kerakyatan, maka UKM harus mampu beropacu tidak lagi hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki tetapi juga menggunakan keunggulan kompetitif yang harus dibangun melalui peningkatan mutu SDM dan kemampuan menguasai teknologi. Dalam hal ini, persyaratan dan pembudayaan kewirausahaan

menjadi sangat strategis dan dengan sendirinya sangat dibutuhkan. Melalui kewirausahaan ini diharapkan akan tumbuh wirausaha unggul yang memiliki ciri-ciri antara lain berani menanggung resiko, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki daya saing yang gigih dan ulet, mampu menghadapi persaingan, tanggap dan dinamis, mempunyai tujuan yang jelas dan mampu merencanakan usaha dengan baik, memiliki motivasi yang tinggi, antisipasi terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan, kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas serta efisien, dan selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru diberbagai bidang.

2) Program kemitraan

Program kemitraan ini dimaksudkan adalah kerjasama usaha antara UKM dengan Usaha Besar yang disertai unsur pembinaan oleh UB kepada mitra binaannya dengan mengikuti prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Adpaun tujuan kemitraan ini adalah untuk memberdayakan UKM juga dalam rangka menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta meningkatkan daya saing global.

2.6.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat kemitraan

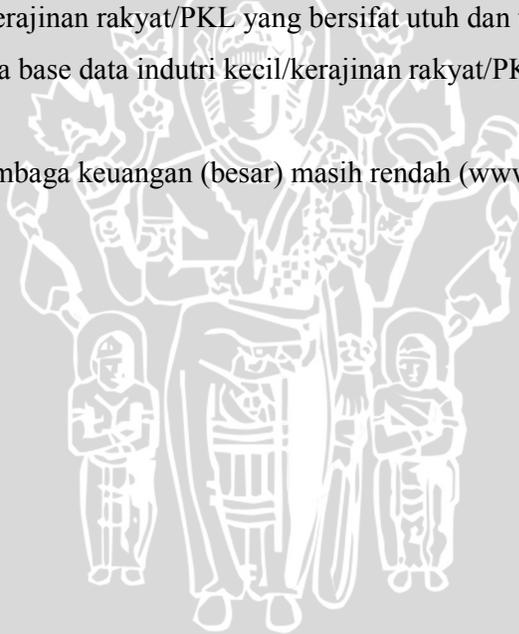
Kemitraan merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dari dua belah pihak yang bermitra yang dibangun berdasarkan kesamaan tujuan, dengan demikian, kemitraan akan berjalan efisien dan efektif dan dapat berjalan secara berkelanjutan atau tidaknya sangat dipengaruhi factor-faktor pendukung, antara lain:

- 1) kondisi lingkungan seperti sistem pasar, kebijakan pemerintah
- 2) kebijakan pembinaan
- 3) keterkaitan kegiatan usaha, adanya keterkaitan akan menimbulkan ketergantungan antar- UKM satu dengan yang lain dan antara UKM dengan koperasi maupun lembaga kemitraan yang dibentuk

- 4) kesetaraan posisi rebut tawar antarpelaku kemitraan, seperti dalam hal permodalan, kepemilikan sarana, kualitas SDM, kemampuan manajemen, dan kewirausahaan
- 5) ada tidaknya potensi konflik
(www.smeccda.com/kajian/files/.../Pengk_Peng_Kemitra2002)

Sedangkan faktor yang menghambat perkembangan UKM antara lain:

- 1) Masih terbatasnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan UKM
- 2) Keakuratan data UKM tangguh dan mandiri masih rendah
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
- 4) Belum adanya pembatasan masuknya produk impor, khususnya dari Cina
- 5) Belum adanya rencana induk (master plan) penataan dan pembinaan industry kecil/kerajinan rakyat/PKL yang bersifat utuh dan terpadu
- 6) Belum akuratnya base data industri kecil/kerajinan rakyat/PKL (terutama non formal)
- 7) Kepercayaan lembaga keuangan (besar) masih rendah (www.bi.go.id).



BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ilmiah sangat diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, dengan maksud agar diperoleh data yang relevan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Pengertian metode penelitian adalah “cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.” (Kartono, 1996:20). Dengan demikian metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis dan teratur untuk melakukan penelitian (mengetahui fenomena tertentu) dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Nasir (1983:63), ”metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Pengertian penelitian kualitatif, menurut Kurt dan Miller sebagaimana dikutip oleh Moleong (2000:3) adalah "bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya".

Penggunaan metode ini dengan alasan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang kemitraan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah di daerah madiun dan sekitarnya dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pembinaan dan kemitraan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun terhadap usaha kecil dan menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

3.1 Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, fokus dari penelitian ini adalah:

1. kemitraan PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan
 - a) Bentuk kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun
 - b) Mekanisme pelaksanaan program kemitraan
 - 1) Proses perencanaan
 - 2) Proses pelaksanaan
 - 3) Evaluasi
2. Manfaat dari pembinaan dan kemitraan yang dilakukan :
 - a) Bagi usaha kecil dan menengah.
 - b) Bagi PT KAI DAOP VII Madiun.
3. Faktor yang dihadapi dalam kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan UKM dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan:
 - a) Faktor pendukung dalam kemitraan.
 - 1) Faktor internal
 - 2) Faktor eksternal
 - b) Faktor penghambat dalam kemitraan.
 - 1) Faktor internal
 - 2) Faktor eksternal

3.2 Lokasi dan Situs Penelitian.

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah kerja PT KAI DAOP VII Madiun.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun situs penelitian ini adalah di kantor PT KAI DAOP VII Madiun.

3.3 Jenis dan Sumber Data.

3.3.1 Jenis Data.

Sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi :

- 1) Data Primer.

Adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh adalah dari bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

- 2) Data Sekunder.

Adalah data yang bukan didapat sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dokumen-dokumen, laporan-laporan ataupun catatan-catatan yang ada di PT KAI DAOP VII Madiun.

3.3.2 Sumber Data.

Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah :

- 1) Informan

Menurut Moleong (2000:90), Informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: pegawai di PKBL PT KAI DAOP VII Madiun terhadap usaha kecil dan menengah di daerah sekitar.

- 2) Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari Kantor PKBL PT KAI DAOP VII Madiun.

- 3) Peristiwa

Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh PKBL PT KAI DAOP VII Madiun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dilapangan yang relevan dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Wawancara.

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan Pembina PKBL untuk memperoleh keterangan atau informasi lisan secara bebas dan mendalam. Keuntungan

wawancara ini adalah untuk mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri subjek penelitian dan hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan akan datang.

2) Observasi.

Peneliti mengadakan pengamatan atas gejala-gejala tertentu baik secara langsung dengan melihat kejadian itu sendiri atau secara tidak langsung dengan menggunakan pengamatan dan pendapat orang lain dilokasi atau lapangan.

3) Dokumentasi.

Cara ini dilakukan dengan mengamati, mencatat serta mempelajari catatan-catatan dan dokumen dalam berbagai bentuk yang isinya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kesemuanya itu ditujukan untuk mendapatkan data sekunder yang berguna dalam analisa data, dimana disadari bahwa tidak semua data yang diperlukan terdapat dilapangan namun harus mencarinya terlebih dahulu dari dokumen yang tersimpan dalam tata kearsipan PT KAI DAOP VII Madiun.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indra dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.
- 2) Pedoman wawancara (interview guide), alat pencatatan (tulis menulis), dan sebagainya.
- 3) Alat pendokumentasian, digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Moloeng (2006:324), ”pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas kriteria derajat

kepercayaan, keteralihan, kenbergantungan dan kepastian”. Selanjutnya dalam Moloeng (2006:326), teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

KRITERIA

1) Kredibilitas

2) Keteralihan

3) Kenbergantungan

4) Kepastian

TEKNIK PEMERIKSAAN

- a) Perpanjang keikutsertaan
- b) Ketekunan pengamatan
- c) Trianggulasi
- d) Pengecekan sejawat
- e) Kecukupan referensial
- f) Kajian kasus negatif
- g) Pengecekan anggota

a) Uraian rinci

a) Audit kenbergantungan

a) Audit kepastian

Selanjutnya menurut Sugiono (2008:269), ”dalam pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan metode penelitian kuantitatif.” Perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif

Aspek	Metode kualitatif	Metode kuantitatif
Nilai kebenaran	Validitas internal	Kredibilitas
Penerapan	Validitas eksternal (generalisasi)	<i>Transferability</i> /keteralihan
Konsistensi naturalitas	Reabilitas Obyektivitas	<i>Audibility, dependability</i> <i>confirmability</i>

3.7 Analisa Data

Proses penganalisaan data merupakan kegiatan yang amat penting dalam suatu metode penelitian, karena dengan analisa data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogdan dan Biklen (dalam Arifin, 1994:77) mendefinisikan bahwa, “Analisa data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain.” Sedangkan menurut Singarimbun (1989:263) bahwa, “analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.”

Menurut Miles dan Huberman (1992:124) analisa data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yaitu data reduction, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verifikasi*. Penjelasannya adalah :

- 1) Data reduction adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah (raw method) yang terdapat dalam buku catatan lapangan. Data reduction berlangsung terus menerus dalam keseluruhan perjalanan proyek penelitian. Tujuannya adalah untuk mempertajam, menetapkan fokus dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, hingga kesimpulan akhir dapat ditarik atau diverifikasi.
- 2) Data display adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa data display akan memudahkan memahami apa yang sedang terjadi dan harus melakukan apa (analisis lebih lanjut atau tindakan)
- 3) *Conclusion drawing*, akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti, kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka fikir peneliti maupun dengan kolega peneliti. Dalam artian makna yang muncul dari data yang telah diuji dengan berbagai cara hingga diperoleh validitas dan akurasinya.



BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

4.1.1.1 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh "Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar - Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km hilang, yang diperkirakan karena dibongkar pada masa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang memperkerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro - Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam "Angkatan Moeda Kereta Api" (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya "Djawatan Kereta Api Republik Indonesia" (DKARI).

Tabel 2. Sejarah Perkeretaapian Indonesia

Periode	Status	Dasar Hukum
Th. 1864	Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda	
1864 s.d 1945	Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrijf (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)	IBW
1945 s.d 1950	DKA	IBW
1950 s.d 1963	DKA - RI	IBW
1963 s.d 1971	PNKA	PP. No. 22 Th. 1963

1971 s.d.1991	PJKA	PP. No. 61 Th. 1971
1991 s.d 1998	PERUMKA	PP. No. 57 Th. 1990
1998 s.d.	PT. KERETA API (Persero)	PP. No. 19 Th. 1998 Keppres No. 39 Th. 1999 Akte Notaris Imas Fatimah

Sumber : situs resmi PT KAI(www.kereta-api.com)

4.1.1.2 PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun

PT KAI DAOP VII adalah satuan organisasi di lingkungan PT Kereta Api (persero) yang berada di bawah Direksi PT Kereta Api (persero). Daerah operasi VII Madiun dipimpin oleh seorang kepala daerah operasi (KADAOP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direksi PT Kereta Api (persero). Wilayah kerja dan batas wilayah kerja dari daerah operasi VII Madiun meliputi;

a. Lintas operasi, dengan batas sebagai berikut:

- 1) Batas barat DAOP VII Madiun dengan DAOP VI yogyakarta terletak pada KM 221+000 antara walikukun-kedungbanteng pada lintas wonokromo-solobalapan.
- 2) Batas timur DAOP VII Madiun dengan DAOP VIII Surabaya terletak pada KM 64+200 antara mojokerto-curah malang pada lintas wonokromo-solobalapan dan KM 134+300 antara blitas-rejotangan pada lintas bangil-kertosono serta KM 70+000 lintas jombang-babat.

b. Lintas tidak operasi:

- 1) Lintas Jombang-Pare-Kediri
- 2) Lintas Jombang Kota-Babad
- 3) Lintas Madiun-Ponorogo-Slahung
- 4) Lintas Papar-Pare
- 5) Lintas Pare-Pohsete
- 6) Lintas Pare-Konto
- 7) Lintas Pulorejo-Kandangan
- 8) Lintas Krian-Ploso
- 9) Lintas Gurah-Kuwarasan
- 10) Lintas Pesantren-Wates
- 11) Lintas Brenggolo-Jengkol

- 12) Lintas Tluggagung-Tugu
- 13) Lintas Ponorogo-Badegan

Dalam pelaksanaan tugasnya kepala DAOP VII mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perusahaan angkutan kereta api serta merumuskan dan menyusun program pembinaan dan pengendalian pelaksanaan angkutan penumpang dan atau barang di wilayah daerah operasi. Kepala daerah operasi VII Madiun, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh :

a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum

Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala DAOP VII Madiun. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas pokok menyusun program pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia, melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan umum, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, memberikan pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan lingkungan kerja, keselamatan kerja dan keselamatan SDM serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi kerja Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) di wilayah daerah operasi.

Seksi Sumber Daya Manusia terdiri dari:

1) Sub Seksi Sumber Daya Manusia

Sub seksi sumber daya manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM, administrasi dan sistem informasi SDM serta melaksanakan pengendalian, pembinaan, pelatihan, sertifikasi dan evaluasi SDM.

2) Sub Seksi Kerumahtanggaan dan Umum

Sub Seksi Kerumahtanggaan dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan protokoler, tata usaha, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta alat tulis kantor, pencatatan barang inventaris, pengaturan dan pelaksanaan transportasi (mobil tool) dan akomodasi perkantoran, pengurusan wisma, serta pengarsipan surat-menyurat dan peraturan-peraturan perkeretaapian.

3) Sub Seksi Hukum

Sub Seksi Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan, serta menjadi sumber informasi hukum dan peraturan bagi pegawai.

4) Sub Seksi Hygiene Perusahaan, Kesehatan Lingkungan Kerja (HIPERKES) dan Keslamatan Kerja

Sub Seksi Hiperkes dan Keslamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksakan penelitian, pegujian dan pembinaan hygiene perusahaan dan kesehatan (HIPERKES), ergonomi dan psikologi kerja, melaksanakan pengujian kesehatan SDM, melaksanakan pelatihan dan pembinaan keslamatan kerja, perkindungan kerja dan pencegahan kcelakaan kerja bagi berbagai peralatan kerja dan bahan kerja yang berbahaya, serta menyediakan bahan dan alat keslamatan kerja.

5) Unit Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada pegawai dan keluarga yang masih menjadi tanggungannya, khusus kepada UPK Madiun menanbahkan kesehatan gigi. Unit pelayanan kesehatan di PT KAI DAOP VII Madiun terdiri dari:

- (a) UPK Madiun
- (b) UPK Kertosono
- (c) UPK Jombang
- (d) UPK Kediri

b. Seksi Keuangan

Seksi keuangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala daerah DAOP VII Madiun. Seksi keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan dan pengadministrasian keuangan, mengkoordinasi penyusunan rencana kerja anggaran tahun daerah operasi dan laporan keuangan serta membina pelaksanaan akuntansi. Seksi keuangan daerah terdiri dari:

1) Sub Seksi Administrasi Keuangan

Sub Seksi Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran gaji pegawai

dan non pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumentasi analisa dan tata usaha keuangan.

2) Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi

Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas pokok mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Operasi.

c. Pemeriksaan Kas Daerah

Pemeriksaan Kas Daerah dipimpin oleh Pemeriksa Kas Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi (KADAOP) VII Madiun. Pemeriksaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan jadwal dan mekanisme kerja para pemeriksa kas, memimpin pemeriksaan kas stasiun / perbendaharaan kas stasiun / perhentian dan kas besar, serta melaksanakan pemeriksaan di atas kereta api. Pemeriksaan kas daerah terdiri dari:

1) Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan jadwal pemeriksaan kas stasiun/perbendaharaan kas stasiun/perhentian, kas besar, pemeriksaan diatas kereta api, serta melaksanakan penatausahaan pemeriksaan kebenaran setoran pendapatan ke bank koordinator daerah.

2) Pemeriksaan Kas Stasiun

Pemeriksaan Kas Stasiun mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan kas stasiun/perbendaharaan kas stasiun/perhentian, kas restorka, kas besar dan melaksanakan pemeriksaan diatas kereta, serta menyusun laporan hasil pemeriksaan (LPH) sesuai dengan wilayahnya, yaitu; walikukun, kedunggalar, paron, geneng, barat, Madiun, babadan, caruban, saradan, wilangan, bagor, nganjuk, sukomoro, baron, kertosono, sembung, jombang, peterongan, sumobito, curahmalang, purwosari, papar, minggiran, susuhan, kediri, ngadiluwih, kras, ngujang, tulungagung,

sumbergempol, ngunut dan rejo tangan (seluruh wilayah daerah operasi VII Madiun)

d. Hubungan Masyarakat Daerah

Hubungan Masyarakat Daerah (humasda) dipimpin oleh seorang kepala humasda yang bertanggung jawab kepada kepala daerah operasi VII Madiun. Humasda mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan hubungan masyarakat, melaksanakan penyuluhan di lingkungan perusahaan dan media masa di luar perusahaan.

e. Seksi Jalan Rel dan Jembatan

Seksi Jalan Rel dan Jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala daerah operasi VII Madiun. Seksi jalan dan rel mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan dan melaksanakan program pemeliharaan rel, sepur simpang dan jembatan serta mengevaluasi kinerja pemeliharaan rel, sepur simpang dan jembatan di wilayah daerah operasi VII Madiun.

Seksi jalan rel dan jembatan terdiri dari:

- 1) Pengawas
 - (a) Pengawas jalan rel Madiun
 - (b) Pengawas jalan rel Kertosono
 - (c) Pengawas jembatan Madiun
- 2) Sub seksi program
- 3) Sub seksi konstruksi jalan rel
- 4) Sub seksi konstruksi jembatan
- 5) UPT resor jalan rel
- 6) UPT resor jembatan

f. Seksi Operasi dan Pemasaran

Seksi operasi dan pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala daerah operasi VII Madiun. Tugas pokok dari seksi operasi dan jabatan adalah melaksanakan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi kinerja operasi dan pemasaran angkutan penumpang dan barang.

Seksi operasi dan pemasaran terdiri dari:

- 1) Pengawas operasi dan pemasaran
 - (a) Pengawas operasi dan pemasaran Madiun
 - (b) pengawas Operasi dan pemasaran kertosono
 - (c) pengawas operasi sarana telekomunikasi Madiun
- 2) Sub Seksi Operasi Teknis dan Perjalanan Kereta Api
- 3) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Penumpang
- 4) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Barang
- 5) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
- 6) UPT Pengendalian Operasi Kereta Api Terpusat
- 7) UPT Pelayanan Operasi Sarana Telekomunikasi
- 8) UPT Stasiun

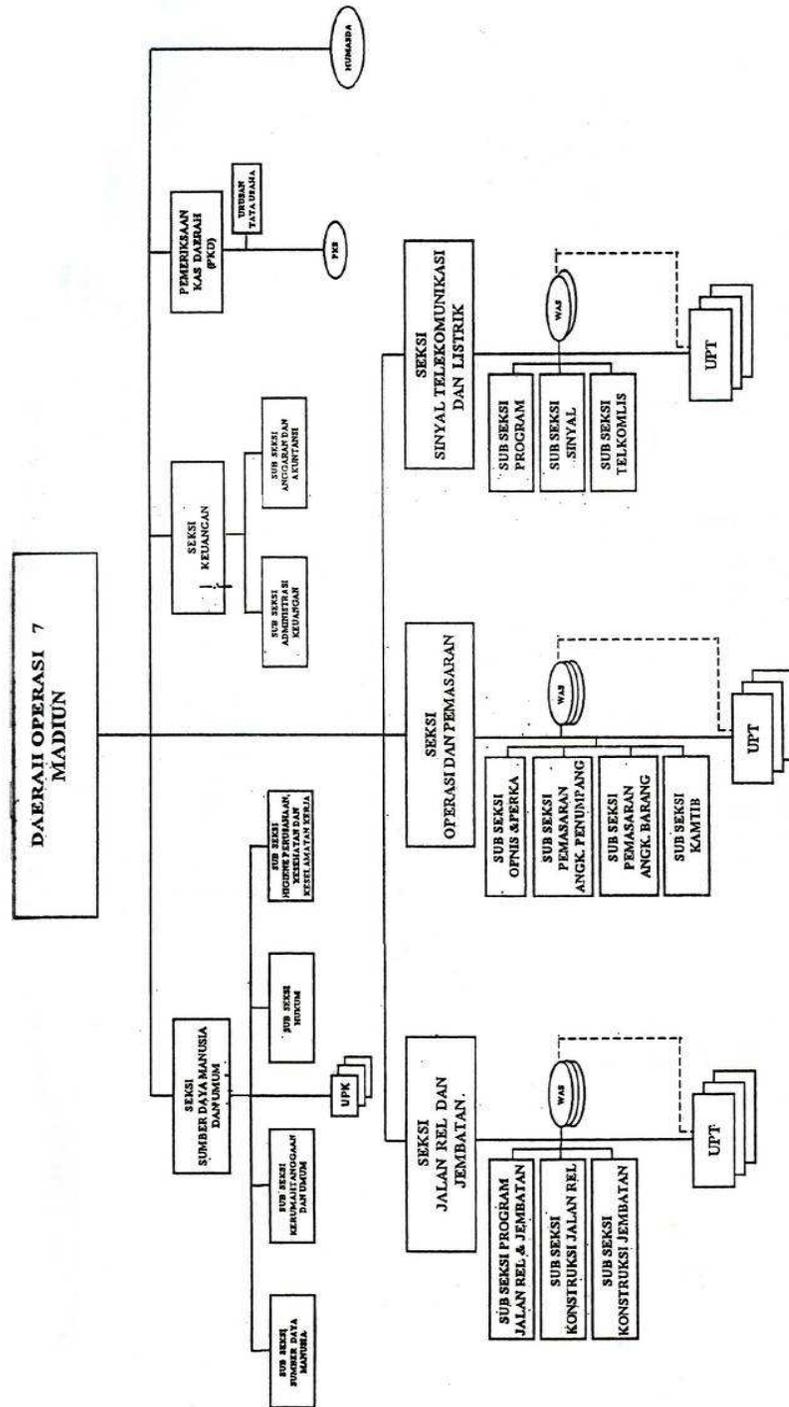
g. Seksi Sinyal, Komunikasi dan Listrik

Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala daerah operasi VII Madiun

Seksi sinyal, telekomunikasi dan listrik mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program, serta mengevaluasi pemeliharaan sinyal, komunikasi dan listrik umum.

Seksi sinyal, telekomunikasi dan listrik daerah operasi VII Madiun terdiri dari

- 1) Pengawas sinyal, tekomunikasi dan listrik
 - (a) Pengawas sinyal, telekomunikasi dan listrik (was sintelis) Madiun
 - (b) Pengawas sinyal tekomunikasi dan listrik (was sintelis) kertosono
- 2) Sub seksi program
- 3) Sub seksi sinyal
- 4) Sub seksi telekomunikasi dan listrik
- 5) UPT resor sinyal
- 6) UPT resor telekomunikasi
- 7) UPT resor listrik umum



Gambar 2. Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun

4.1.1.3 Kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah

Selain kontribusi dalam pembayaran pajak kepada negara PT Kereta Api DAOP VII Madiun juga melaksanakan pertanggung jawaban kepada usahawan kecil dan menengah yang berada pada daerah operasionalnya atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Bentuk dari pelaksanaan pertanggungjawaban ini adalah dengan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Program kemitraan yang dijalankan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dengan UKM biasanya disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Landasan operasional sebagai pedoman BUMN untuk memberikan bantuan kepada Usaha Kecil dan Koperasi adalah dimulai dari munculnya Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 1232 / KMK.013 / 1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN, nama program tersebut dikenal dengan “Program Pegelkop”.

Didalam Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989 disebutkan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2). Pembinaan diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (Pasal 3). Kepmenkeu No. 1232 Tahun 1989 tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa pembiayaan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN diambil / disediakan dari bagian laba BUMN yang bersangkutan, dengan besaran antara 1%-5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4). Dengan Kepmenkeu No. 306 / KMK.013 / 1991 Tanggal 20 Maret 1991, yang merupakan penyempurnaan Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989, diberikan batasan maksimal pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 7 ayat 2). Pelaksanaan pembinaan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Berdasarkan Kepmenkeu No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, nama program diubah menjadi “PUKK”. Pasal 2 Kepmenkeu No. 316 Tahun 1994 tersebut ditegaskan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Sumber dana pembinaan berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar antara 1%-5% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak. Bentuk pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian dan perdagangan, untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen, serta teknik berproduksi, jaminan kredit dan penyertaan pada perusahaan modal ventura yang membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Pada tahun 1995 diterbitkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang didalamnya terkandung komitmen secara eksplisit yakni : pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi (Pasal 14). Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain (Pasal 21).

Kurun waktu berikutnya lahir PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang didalam Penjelasan Pasal 10 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteri Negara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan BUMD yang bersangkutan. Hingga pada akhirnya, tahun 2003 terbit UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian khusus menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan dijabarkan lebih lanjut dengan

Kepmen.BUMN No. Kep-236/MBU/2003 juncto Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Menindaklanjuti dari keluarnya keputusan dari menteri BUMN ini pihak PT Kereta Api (persero) mengeluarkan surat keputusan direksi no. KU.502/V/I/KA-2007 yang mengatur tentang kegiatan kemitraan yang dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero). Keputusan ini mencakup inti dari pengertian-pengertian, tata cara pemberian bantuan, kewajiban mitra binaan dan ketentuan lainnya yang pada prinsipnya adalah :

1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c) Milik Warga Negara Indonesia;
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hokum termasuk koperasi;
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun dan ada potensi untuk berkembang;

2) Sumber dana dan penggunaan dari dana kemitraan

Berdasarkan peraturan menteri negara BUMN nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 april 2007, sumber dan penggunaan dana PKBL sebagai berikut:

- a) program kemitraan :
 - (1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - (2) Pengembalian pokok pinjaman;
 - (3) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
- b) program bina lingkungan :
 - (1) penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);

- (2) hasil bunga deposito atau jasa giro dari dana program bina lingkungan;
 - (3) setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) disalurkan oleh PT Kereta Api (persero), dan 30% (tiga puluh persen) disetorkan kepada program bina lingkungan BUMN peduli.
- c) Penggunaan dana program kemitraan :
- (1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - (2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan mitra binaan;
 - (3) Hibah
 - (a) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk mengkaji/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan;
 - (b) Beban pembinaan yang bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - (c) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk mitra binaan.
- d) Penggunaan dana bina lingkungan digunakan untuk memberikan bantuan kepada :
- (1) Korban bencana alam
 - (a) Penyediaan bahan-bahan korban bencana alam
 - (b) Penyediaan obat-obatan dan tenaga medis
 - (c) Bantuan perahu karet, tenda pengungsian/tempat penampungan sementara
 - (d) Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat
 - (2) Pendidikan dan atau pelatihan

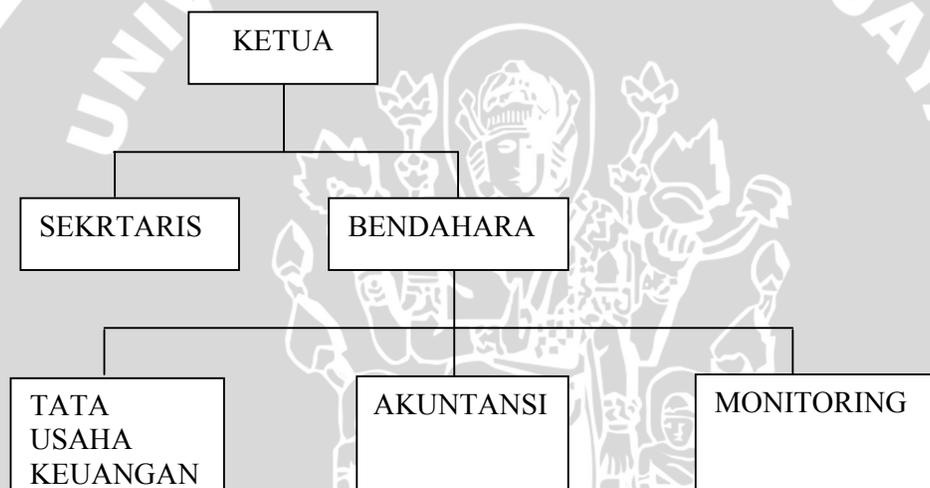
- (a) Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah
 - (b) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa
 - (c) Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah
 - (d) Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
- (3) Peningkatan kesehatan
- (a) Renovasi balai kesehatan masyarakat
 - (b) Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat
- (4) Pengembangan prasarana dan atau sarana umum
- (a) Rehabilitasi sarana pendidikan
 - (b) Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum
 - (c) Pembangunan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan
- (5) Sarana ibadah
- (a) Bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah
 - (b) Pengadaan perlengkapan ibadah
 - (c) Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan

Dengan adanya pedoman yang mengatur tentang program kemitraan antara PT KAI dengan Usaha Kecil dan Menengah, maka diharapkan usaha kecil dan menengah dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat yang sehat, efisien, tangguh, kuat dan mandiri serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dengan tumbuh dan berkembangnya UKM maka akan banyak menyerap tenaga kerja, pemeratakan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan regional. Selain itu agar program kemitraan yang dijalankan oleh pihak PT Kereta Api (persero) dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan operasional program kemitraan ini PT Kereta api Indonesia (persero) membentuk tim program kemitraan dan bina lingkungan yaitu tim pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang ditetapkan

berdasarkan keputusan kepala divisi atau kepala daerah operasi. Tim pelaksana ini berbentuk tim fungsional yang susunannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah operasi sebagai pengarah
- 2) Kasi administrasi/kasi keuangan sebagai ketua
- 3) Kasubsi keuangan/kasubsi anggaran dan akuntansi sebagai sekretaris
- 4) Pbd/kepala kas besar sebagai bendahara
- 5) Anggota ditunjuk menurut kebutuhan dan kemampuan yang terdiri atas;
 - a) Bidang tata usaha keuangan
 - b) Bidang akuntansi
 - c) Bidang monitoring



Gambar 3. Tim PKBL PT KAI DAOP VII Madiun

- 1) Kepala PKBL

Tugas dari kepala PKBL adalah melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan PKBL di wilayah kerja DAOP VII Madiun untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga mampu bersaing dalam era pasar bebas.

Uraian Pekerjaan :

- a) Mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran PKBL PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun dan menentukan sasaran program.
- b) Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan daerah operasi lain agar program kemitraan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.
- d) Membuat laporan kegiatan PKBL.

2) Sekretaris

Tugas dari sekretaris PKBL adalah melakukan kegiatan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Uraian pekerjaan

- a) Memberikan masukan dari aspek hukum kepada ketua, berkaitan dengan operasionalisasi PKBL.
- b) Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin.
- c) Menyelenggarakan data base dan penyimpanan dokumen asli perusahaan.
- d) Mengkomunikasikan kebijakan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
- e) Menyiapkan laporan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- g) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan perusahaan.
- h) Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris perusahaan secara benar dan tepat waktu.

3) Bendahara

Uraian pekerjaan

- a) Bersama ketua dan pengurus lainnya merencanakan rencana kerja dan anggaran PKBL.
- b) Mengkoordinasi dan mengawasi pemeliharaan dan inventarisasi terhadap semua dana PKBL.

- c) Mengkoordinasi dan mengawasi persiapan data dan informasi dalam rangka menyusun laporan.
 - d) Membimbing dan mengawasi pekerjaan anggota yang tersusun dalam tim PKBL.
- 4) Tata usaha keuangan

Uraian pekerjaan

- a) mendata permohonan/proposal calon mitra binaan sebelum diadakan evaluasi dan seleksi.
 - b) mendata semua surat masuk/keluar yang berhubungan dengan kegiatan PKBL.
 - c) Menyimpan dan mencari kembali semua berkas/dokumen administrasi sehubungan dengan kegiatan PKBL.
- 5) Akuntansi

Uraian pekerjaan

- a) Menyusun anggaran PKBL.
 - b) Mengumpulkan data keuangan.
 - c) Menyusun/membuat dan analisa laporan keuangan (cash flow, neraca, rugi laba, dan lain-lain)
- 6) Monitoring
- Uraian jabatan
- a) Melakukan survey kepada calon mitra.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap mitra binaan.

4.1.2 Penyajian Data Fokus

4.1.2.1 Bentuk Kemitraan yang Dilaksanakan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah adalah dengan pemberian pinjaman modal usaha disamping memberikan bantuan tentang manajemen dalam pengelolaan usaha. Pada tahun 2008, pemberian pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dilaksanakan secara triwulan sebanyak empat triwulan dalam tahun 2008. Usaha yang dibina

tersebut tergolong dalam tujuh sektor usaha, diantaranya adalah : sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan sektor jasa (lampiran-05).

Pada triwulan pertama jumlah dana yang telah dipinjamkan kepada usahawan kecil dan menengah sebanyak Rp 810.750.000,-(lampiran-01), selanjutnya pada triwulan II jumlah dana yang disalurkan sebanyak Rp 810.750.000,-(lampiran-02), pada triwulan III jumlah dana yang disalurkan meningkat menjadi Rp 855.750.000,-(lampiran-03), dan pada triwulan yang terakhir pada tahun 2008 dana yang disalurkan sebanyak Rp 915.750.000,-(lampiran-04).

Pembinaan yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VII kepada usaha kecil dan menengah dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan manjerial dalam pengelolaan usaha. Bantuan ini dilakukan agar nantinya UKM dapat menggunakan dana secara bijak. Hal ini serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh bapak Sri Margono (Kamis, 16 April 2009):

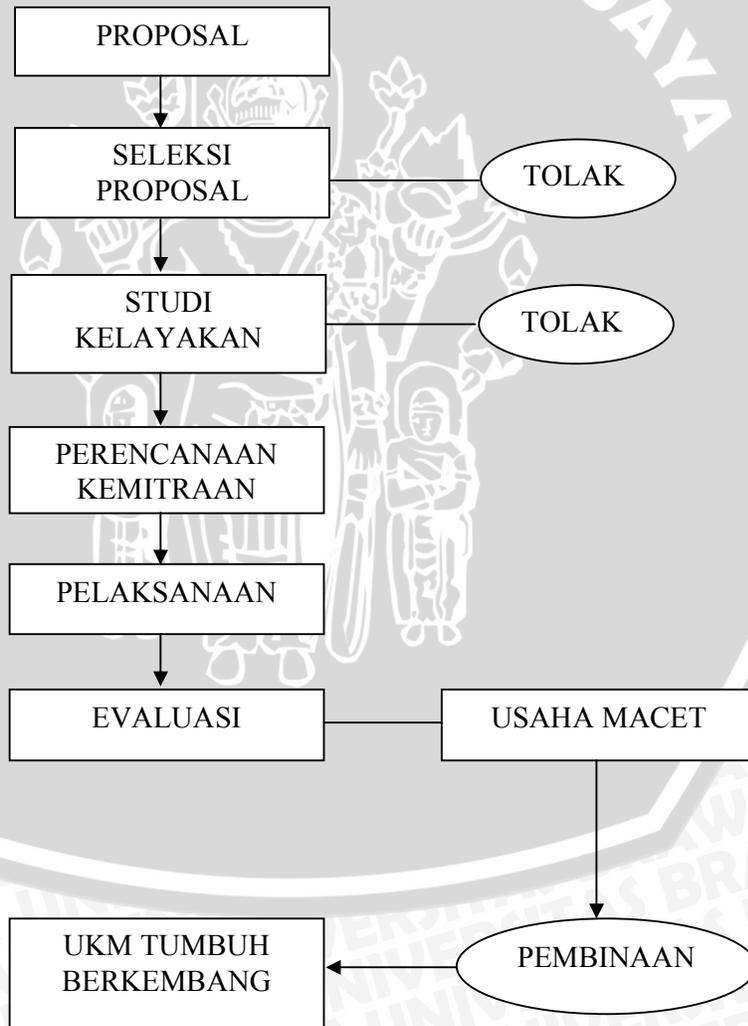
“Disamping memberikan pinjaman kepada UKM, PT KAI DAOP VII Madiun juga memberikan bantuan dalam bidang manajerial, biasanya para UKM yang telah kita bina kita kumpulkan dan selanjutnya kita melakukan sharing tentang perkembangan usaha masing-masing UKM, pada saat ini lah kita dari pihak KAI memberikan bantuan dalam bidang kemampuan manajemennya.”

Tabel 3. Perjalanan program kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun

Kereta api		kemitraan dengan usaha kecil dan menengah		
Periode	status	Dasar hukum	program	Pola/bentuk
1864-1945	Jaman Belanda	-	-	-
1945-1950	DKA	-	-	-
1950-1963	DKA - RI	-	-	-
1963-1971	PNKA			
1971-1991	PJKA	Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1983 Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989 Kepmenkeu No.	Program Pegelkop	Bapak angkat usaha kecil / industri kecil

		306 / KMK.013 / 1991		
1991-1998	PERUMKA	Kepmenkeu No. 316/KMK.016/1994 PP No. 32 Tahun 1998	PUKK	Bapak angkat usaha kecil / industri kecil
1998-sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007	PKBL	Inti-plasma

4.1.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil dan Menengah.



Gambar 4. Diagram Alir Program Kemitraan

- a) Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahannya untuk diajukan kepada PT Kereta Api (Persero), dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat unit usaha
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
 - 3) Bukti identitas pemilik/pengurus unit usaha
 - 4) Bidang usaha
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada)
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha) dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana
- b) Sub tim PKBL melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan setelah berkoordinasi dengan koordinator BUMN pembina setempat.

Dalam hal ini evaluasi dan seleksi didasarkan pada criteria sebagai berikut;

 - 1) Memenuhi persyaratan administrasi (dokumen permohonan lengkap)
 - 2) Belum pernah dibina oleh BUMN lain

Setelah memenuhi syarat tersebut calon mitra yang dinyatakan layak permohonan untuk mendapatkan pinjaman bisa untuk mengikuti tahap yang selanjutnya.
- c) Melaksanakan survey dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha PT Kereta Api (persero).

Hal-hal yang diidentifikasi oleh PT Kereta Api (persero) terhadap calon mitra secara umum adalah sebagai berikut;

 - 1) Kemampuan pimpinan
 - 2) Jenis usaha yang dijalankan
 - 3) Lokasi usaha
 - 4) Manfaat dari pinjaman PT Kereta Api bagi calon mitra
 - 5) Kemampuan pengembalian dilihat dari proposal yang diajukan

Setelah menetapkan criteria tersebut, PT Kereta Api menentukan calon mitra yang layak untuk dibina dengan criteria sebagai berikut;

- 1) Masih di daerah operasi VII Madiun
 - 2) Perputaran cash flow dan sumber usaha
 - 3) Sumber keuangan
 - 4) Lingkungan sekitar yang berpengaruh
 - 5) Kemampuan pimpinan
 - 6) Kemampuan pengembalian pinjaman
- d) Berdasarkan daftar mitra binaan PT Kereta Api (persero) divisi dan Daop yang telah disetujui oleh Kadivre / Kadaop atas nama direksi maka dana dapat diberikan kepada mitra binaan

Penyaluran dana kepada mitra binaan dapat berupa

- 1) Pinjaman bantuan modal kerja dan investasi
- 2) Pinjaman khusus dan
- 3) Hibah

4.1.2.2.1 Perencanaan

1) Penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran

Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT Kereta Api Indonesia (persero) terlebih dahulu membuat rencana kerja dan anggaran yang terpisah dari rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dalam rencana kerja PKBL sekurang-kurangnya memuat:

- a) Rencana kerja program kemitraan dan bina lingkungan, dirinci menurut wilayah binaan
- b) Anggaran program kemitraan dan bina lingkungan, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja
- c) Proyeksi posisi keuangan, laporan aktivitas dan arus kas PKBL
- d) Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Selanjutnya rencana kerja yang telah dibuat diajukan kepada pemegang saham dalam waktu 90 hari sebelum tahun anggaran, yang pelaksanaannya 60 hari digunakan untuk pengajuan ke pemegang saham dan 30 hari untuk pengesahan dana PKBL oleh pemegang saham. Dalam hal rencana kerja dan anggaran PKBL

belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu, maka rencana kerja dan anggaran PKBL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan.

2) Penyediaan dana dan sisitem perbankan

a) Tingkat pusat

Dana program kemitran PT kereta api Indonesia (Persero) DAOP VII madiun dengan usaha kecil dan menengah berasal dari laba yang sebelumnya telah ditetapkan pembagiannya dalam rapat pemegang saham. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan rekening giro kantor pusat ke rekening bank di daerah dan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening program kemitraan dan bina lingkungan.

Rekening giro bank PKBL menampung dana dari

- (a) Penyisihan laba
- (b) Bunga deposito dan atau jasa giro
- (c) Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain.
- (d) Dana tersebut dikurangi biaya operasional.

b) Tingkat daerah

Dari dana yang telah di pindahbukukan dari rekening giro kantor pusat, maka tim PKBL di daerah harus membuka rekening giro yang menampung dana untuk pengelolaan kemitraan dan bina lingkungan tersebut.

Rekening giro bank PKBL menampung dana dari

- (a) Pemindahbukuan dari dana kemitraan kantor pusat
- (b) Pengembalian pokok pinjaman
- (c) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jaa giro dana PKBL setelah dikurangi beban operasional

3) Perencanaan penyaluran pinjaman

Dalam progam kemitraan yang dijalankan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia(persero) DAOP VII ini sasaran penyaluran pinjamannya adalah bagi usaha kecil yang telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun dan

ada potensi untuk berkembang dan belum mempunyai persyaratan perbankan serta belum pernah mendapat dari BUMN lain.

Dalam proses perencanaan juga dibuat syarat-syarat analisis dan sanksi kepada mitra binaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kolektibilitas pengembalian pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet.

a) Syarat-syarat pada saat akan memberikan pinjaman antara lain:

(1) Three R

(a) Returns

Mengetahui manfaat kredit yang diberikan dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang sesuai rencana.

(b) Repayment capacity

Adanya kemampuan mitra binaan pemohon pinjaman untuk membayar pinjaman pada saat-saat yang menentukan bahwa pinjaman tersebut harus diangsur dan dilunasi.

(c) Risk bearing ability

Penilaian kemampuan terhadap calon mitra binaan sehingga dapat diketahui apabila terjadi ketidakmampuan membayar kewajiban yang berasal dari usaha yang bersangkutan.

(2) Five C

(a) Character

Meneliti dan memperhatikan sifat pribadi, cara hidup, status social dan lain-lain. Hal ini penting karena berkaitan dengan kemauan untuk membayar.

(b) Capabilitas

Meneliti kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya dalam meraih penjualan ataupun pendapatan yang dapat diukur dari penjualan yang dicapai pada masa lalu dan juga keahlian yang dimiliki dalam bidang usahanya, hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk membayar.

(c) Capital

Mengukur posisi keuangan secara umum dengan memperhatikan capital/modal yang dimiliki perusahaan dan juga perbandingan hutang dan capital.

(d) Coleteral

Mengukur besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai kolateral atas kredit.

(e) Kondisi

Memperhatikan kondisi perekonomian pada umumnya serta kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap jalannya usaha mitra binaan.

b) Analisa kredit

Setiap pemberian kredit harus dianalisis antara lain dengan cara :

(1) Menghitung rasio likuiditas

Untuk mengetahui kemampuan mitra binaan dalam hal memenuhi kewajibannya/membayar cicilan dalam jangka waktu pendek.

Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut

$$(a) \frac{\text{Harta lancar}}{\text{Hutang lancar}} = \text{skor terbaik 2-3}$$

$$(b) \frac{\text{Harta lancar} - \text{persediaan}}{\text{Hutang lancar}} = \text{skor terbaik maksimal 1}$$

(2) Menghitung rasio pengungkit

Untuk mengetahui presentase jumlah dana yang disediakan oleh hutang. Adapun cara untuk menghitungnya adalah sebagai berikut

$$(a) \frac{\text{Jumlah harta}}{\text{Jumlah harta}} = \text{skor terbaik} \leq 0,5$$

$$(b) \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Saham}} = \text{skor terbaik} \leq 0,5$$

(3) Menghitung rasio kegiatan

Untuk menunjukkan bagaimana mitra binaan menggunakan sumber dananya secara efektif, dengan memperbandingkan pendapatan dan penjuakan dengan sumber dana, serta untuk mengetahui perputaran harta dan bagaimana mengelola harta secara efisien. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut

(a) Perputaran harga

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Jumlah harta}} = \text{skor terbaik 9}$$

(b) Penjualan harga tetap

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Harga tetap bersih}} = \text{skor terbaik 9}$$

(c) Perputaran piutang

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}} = \text{skor terbaik 10}$$

(d) Periode penagihan rata-rata

$$\frac{\text{Satu tahun (360 hari)}}{\text{Perputaran piutang}} = \text{skor terbaik 10}$$

(4) Menghitung rasio kemampulabaan (profitability)

Untuk mengetahui kemampuan laba mitra binaan dalam menjalankan usahanya, dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan, laba bersih dengan jumlah harta, dan laba bersih dengan modal bersih

(a) $\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}} = \text{skor terbaik adalah } \geq 5$

(b) $\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Jumlah harta}} = \text{skor terbaik adalah } \geq 5$

$$\text{(c) } \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal bersih}} = \text{skor terbaik adalah } \geq 5$$

Akan tetapi dalam pelaksanaannya rumus-rumus ini tidak digunakan secara keseluruhan, akan tetapi penggunaannya disesuaikan dengan kondisi mitra binaan.

c) Besaran bunga dan pinjaman

- (1) Besarnya jasa administrasi pinjaman atau bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun dari limit pinjaman
- (2) Apabila peminjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin 6% (enam persen)
- (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasil untuk PT Kereta Api (persero) adalah mulai 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50)

d) Syarat angsuran pinjaman

- (1) Dalam kondisi normal rumusnya angsuran perbulan adalah sebagai berikut

$$\frac{PP}{u} + (SP \times \frac{SB}{U})$$

- (2) Bila terjadi tunggakan rumusnya :

$$\{(\text{jumlah tunggakan PP} + \text{bunga})\} + \left\{ \frac{PP}{U} + (SP \times \frac{SB}{U}) \right\}$$

Keterangan

PP = pinjaman pokok

SP = saldo peminjaman/sisa pinjaman

SB = suku bunga

U = jangka waktu pengembalian/cicilan (umur pinjaman)

e) Sanksi-sanksi

- (1) Apabila mitra binaan tidak memenuhi kewajiban maka harus diberikan tegoran bertahap dalam waktu selama satu bulan :
 - (a) Tegoran 1
 - (b) Tegoran 2

- (c) Tegoran 3
- (2) Apabila setelah diberikan tegoran ke 3 mitra binaan belum memenuhi kewajiban, maka bunga diperhitungkan, ditambahkan pada saldo pinjaman.
 - (3) Apabila setelah mendapat tiga kali berturut-turut ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, maka barang yang dijadikan anggunan disita oleh PT KAI dan segera dikembalikan apabila kewajibannya telah diselesaikan.
 - (4) Setelah berakhirnya jangka waktu pinjaman mitra binaan tidak memenuhi sama sekali, maka PT KAI akan mengadakan pelelangan atas barang jaminan.
- f) Jangka waktu program kemitraan
- Jangka waktu dari program kemitraan antara PT KAI dengan UKM adalah maksimal selama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang waktu 3 bulan.

Dalam pembuatan perencanaan tersebut berdasarkan pada kebijakan langsung dari pusat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Sri Hartanto (Kamis, 16 April 2009):

“Dalam proses kemitran ini pihak yang berpengaruh adalah pusat tentunya, karena kebijakan dari pelaksanaan PKBL ini langsung dari pusat, kemudian untuk tingkat pelaksanaan di daerah tentunya rekomendasi dari pimpinan.”

4.1.2.2.2 Pelaksanaan

1) Penerbitan surat persetujuan pemberian dana

- a) Berdasarkan proposal mengenai prospek dan perkembangan usaha serta rencana penggunaan dana bantuan perkembangan dari para calon mitra binaan melalui tim PKBL masing-masing daerah melakukan seleksi administrasi, survey lapangan dan evaluasi atas permohonan tersebut.
- b) Sesuai dengan hasil butir diatas maka diterbitkan surat persetujuan pemberian dana kemitraan oleh kadaop/kadrive, yang dilampiri dengan daftarnama binaan yang akan diberi bantuan beserta besarnya dana yang diberikan untuk masing-masing mitra binaan tersebut.

- c) Dana yang diberikan kepada masing-masing mitra binaan maksimal 75% dari kebutuhan yang diajukan.

2) Penyaluran/pengeluaran dana kemitraan

a) Tingkat pusat

1) Penyaluran kepada daerah operasi

(a) Berdasarkan surat direksi tentang pengalokasian dana ke masing-masing daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi proposal calon mitra binaan dan lingkungan dana kemitraan / bina lingkungan maka apabila terdapat kekurangan daerah operasi / divisi regional dapat mengajukan dana yang dimaksud kepada direktur keuangan.

(b) Direktur keuangan dapat memperhatikan pengajuan dari daerah operasi dan likuiditas dana program kemitraan maka dapat melakukan pemindahbukuan ke daerah operasi/divisi regional yang memerlukan.

(c) Penyaluran untuk keperluan hibah

(d) Penyaluran kepada unit selain daerah operasi berdasarkan perintah / persetujuan direksi dan pemegang saham.

b) Tingkat daerah/divisi regional

1) Berdasarkan hasil evaluasi proposal calon mitra binaan daerah operasi yang disetujui kepala daerah operasi sub tim PKBL daerah dapat menyalurkan dana PKBL.

2) Penyaluran dana dilakukan oleh ketua PKBL daerah / pejabat yang diberi wewenang untuk hal tersebut, dengan menerbitkan berita acara serah terima dana PKBL yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan ukti pengeluaran kas dan perintah pemindahbukuan rekening giro bank dari rekening giro bank PKBL ke rekening mitra binaan yang bersangkutan.

3) Penyaluran dapat berupa pinjaman atau hibah, untuk penyaluran dana yang berupa pinjaman harus didukung dengan surat perjanjian kontrak pinjaman yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

sedangkan penyaluran dalam bentuk hibah harus didukung hasil evaluasi proposal.

3) Kewajiban mitra binaan

- a) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang disetujui oleh BUMN pembina
- b) Menyelenggarakan pembukuan
- c) Membayar kembali secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- d) Menyampaikan perkembangan usaha tiap triwulan kepada BUMN pembina

4) Kewajiban PT Kereta Api Indonesia (persero)

- a) Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon mitra binaan secara langsung
- b) Menyiapkan dan menyalurkan dana program kemitraan dan bina lingkungan
- c) Melakukan emantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan
- d) Melakukan pembukuan atas mitra binaan

5) Penagihan piutang

- a) Berdasarkan berita acara serah terima dana kemitraan dan surat perjanjian/kontrak pinjaman untuk mitra binaan yang diberikan dana berupa pinjaman, diberlakukan pencatatan pada kartu piutang PKBL untuk masing-masing debitur.
- b) Pembayaran dilakukan berdasarkan sesuai dengan jadwal penagihan piutang berdasarkan kontrak perjanjian tersebut, apabila belum diterima angsuran sampai dengan 10 hari setelah jadwal jatuh tempo pembayaran maka dilakukan penagihan oleh tim PKBL daerah yang bersangkutan. Penagihan dilakukan dengan menggunakan surat penagihan piutang dalam 3 (tiga) rangkap sebagai berikut;
 - 1) Lembar asli kepada mitra binaan
 - 2) Lembar kedua sebagai arsip bendaharawan
 - 3) Lembar ketiga sebagai arsip tim PKBL

- c) Atas penerimaan kas asal pembayaran piutang segera dibuatkan dokumen penerimaan kas/bank oleh bendaharawan tim PKBL dalam rangkap 3 (tiga) yang didistribusikan sebagai berikut:
 - 1) Lembar asli kepada mitra binaan
 - 2) Lembar kedua sebagai arsip bendaharawan
 - 3) Lembar ketiga sebagai arsip tim PKBL
- d) Terhadap penerimaan kas tersebut dicatat pula pada buku penerimaan dan pengeluaran kas/dana PKBL
- e) Dalam hal mitra binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran bunga pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

6) Kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain

Dalam pelaksanaan program kemitraan ini pihak PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun, melakukan kerjasama dengan pihak bank sebagai penyalur dan tempat pembayaran pinjaman dan melakukan koordinasi dengan pihak lain yaitu PT KAI daerah operasi yang berdekatan. Karena dalam pelaksanaan program ini PT KAI DAOP VII Madiun hanya melakukan kemitraan kepada mitra binaan yang berada pada daerah operasi VII saja, dan seandainya ada calon mitra binaan yang di luar wilayah daerah operasional VII pihak PT KAI DAOP VII Madiun menyarankan untuk mengajukan bantuan kepada pihak yang sesuai dengan daerah tersebut. Dan pelaksanaan kemitraan ini dari tahap perencanaan sampai dengan proses evaluasi di tangani sendiri oleh pihak PT KAI DAOP VII sendiri. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Sri Hartanto (Kamis, 16 April 2009) selaku koordinator pelaksana PKBL,

“Dalam pelaksanaan program kemitraan ini ditujukan hanya untuk para usaha kecil menengah yang berada di daerah operasi VII Madiun saja, karena luar daerah operasi VII sudah menjadi tanggungan pihak yang lain.”

7) Laporan keuangan

- a) Kewajiban penyusunan pelaporan
 - 1) Setiap BUMN pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan program kemitraan.

- 2) Laporan pelaksanaan program kemitraan terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- 3) Laporan triwulan dan tahunan sekurang-kurangnya memuat;
 - (a) Realisasi pelaksanaan program kemitraan dirinci perwilayah binaan
 - (b) Realisasi anggaran program kemitraan yang terdiri dari;
 - (1) Sumber dana
 - (2) Realisasi penggunaanLaporan tersebut diperinci perwilayah mitra binaan.
 - (c) Perhitungan pendapatan dan beban program kemitraan.
 - (d) Neraca program kemitraan.
 - (e) Perkembangan mitra binaan.
 - (f) Measalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaian.
- 4) Sesuai dengan dikeluarkannya peraturan oleh surat keputusan menteri BUMN maka pihak PT KAI melakukan penyeragaman pelaporan. Format atau bentuk laporan yang dimaksud adalah;
 - (a) Cash flow dana kemitraan
 - (b) Laporan aktivitas program kemitraan
 - (c) Laporan akumulasi dana program kemitraan
 - (d) Penyaluran dana program kemitraan per wilayah dan sector
 - (e) Kualitas pinjaman program kemitraan
 - (f) Neraca program kemitraan
 - (g) Daftar kolektibilitas pinjaman program kemitraan
 - (h) Daftar mutasi pinjaman bermasalah
 - (i) Cash flow dana program bina lingkungan.

b) Masa pelaporan

Direksi BUMN pembinaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program kemitraan kepada menteri atau pemegang saham dengan tembusan kepada komisaris atau dewan pengawas, sebagai berikut;

- 1) Laporan triwulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Pelaporan dilaksanakan secara triwulan dibedakan sebagai berikut

a) PKBL kantor pusat

(1) Menerima laporan pelaksanaan dari daerah mengenai :

- (a) Cas flow (penerimaan dan pengeluaran kas)
- (b) Perkembangan mitra binaan daerah masing-masing
- (c) Permasalahan dan masukan untuk meningkatkan PKBL

(2) Membuat laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan PKBL yang mencakup seluruh unit binaan PT Kereta Api (persero) kepada direksi dan menyiapkan laporan direksi kepada meneg BUMN mengenai:

- (a) Cas flow (penerimaan dan pengeluaran kas)
- (b) Perkembangan mitra binaan daerah masing-masing
- (c) Permasalahan dan masukan untuk meningkatkan PKBL

b) Tim pkbl daerah

Membuat laporan mengenai

- (1) Cas flow (penerimaan dan pengeluaran kas)
- (2) Perkembangan mitra binaan daerah masing-masing
- (3) Permasalahan dan masukan untuk meningkatkan PKBL

2) Laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

c) Penyetoran dana dari PKBL daerah ke PKBL kantor pusat

1) Terhadap penerimaan dana dari cicilan pokok, bunga pinjaman dari mitra binaan juga dari jasa giro dan bunga deposito atas rekening giro PKBL di daerah, maka apabila diperlukan oleh kantor pusat untuk disetor sesuai dengan permintaan.

2) Penyetoran tersebut melalui pemindahbukuan dari rekening giro bank PKBL daerah ke rekening giro bank PKBL kantor pusat, yang diikuti dengan penerbitan dokumen pengeluaran kas dalam rangkap 3 (tiga) dan didistribusikan sebagai berikut;

- (a) Lembar asli dikirim ke kantor pusat
- (b) Lembar kedua sebagai arsip bendaharawan PKBL daerah
- (c) Lembar ketiga sebagai arsip tim PKBL daerah

- 3) Sesuai dengan bukti tranfer bank dan bukti pengeluaran kas yang diterima dari daerah, maka bendaharawan kantor pusat (Wkk) melakukan;
 - (a) Membuat bukti penerimaan kas PKBL
 - (b) Membuat analisa penerimaan kas PKBL
 - (c) Mencatat penerimaan kas
- d) Rekonsiliasi bank atas dana PKBL
 - 1) Secara periodic/triwulan perlu dilakukan rekonsiliasi antara buku penjagaan kas/bank PKBL baik kantor pusat dan daerah dengan RC yang bersangkutan. Mengingat penjagaan buku bank PKBL dilaksanakan secara ekstra komtabel oleh bendaharawan PKBL dan saldo kas bank dana PKBL tercantum pada laporan keuangan, maka untuk menghindari perbedaan nilai tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi bank secara triwulan baik di daerah maupun di kantor pusat.
 - 2) Atas hasil rekonsiliasi bank tersebut dilaporkan kepada kantor pusat dirku/KW.
- e) Penjagaan
 - 1) Mengingat pelaksanaan PKBL ini berkesinambungan dan harus dilaporkan secara triwulan ke kantor pusat baik mengenai keuangan maupun operasionalnya maka untuk pelaksanaan operasionalnya perlu penjagaan tambahan oleh tim PKBL daerah maupun kantor pusat mengenai perkembangan mitra binaan.
 - 2) Adapun penjagaan tersebut antara lain meliputi informasi mengenai;
 - (a) Cash flow dana PKBL
 - (b) Aktivitas program kemitraan
 - (c) Akumulasi dana program kemitraan
 - (d) Penyaluran dana kemitraan per sector dan per wilayah
 - (e) Kolektibilitas pengembalian pinjaman lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
 - (f) Neraca program kemitraan
 - (g) Identitas mitra binaan

- (h) Jenis usaha mitra binaan
 - (i) Nilai dana bantuan per unit kerja
 - (j) Perkembangan kinerja mitra binaan sebelum dan sesudah dibina (omzet, asset dan tenaga kerja) dan rasio keuangannya
 - (k) Keterangan lainnya yang diperlukan
- f) Pencatatan pinjaman yang bermasalah

Kualitas pinjaman dana kemitraan dinilai berdasarkan pada ketetapan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman mitra binaan. Penggolongan kualitas dana pinjaman ditetapkan sebagai berikut;

- 1) Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Kurang lancar adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sampai dengan 1 (satu) hari dan belum 180 (seratus delapan puluh) hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- 3) Diragukan adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- 4) Macet adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Untuk kredit yang bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) diesahkan untuk pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi criteria;

- 1) Mitra binaan beritikad baik untuk atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.

- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Sedangkan untuk pinjaman bermasalah yang sudah tidak mampu untuk pembayaran pinjaman, maka diusulkan kepada RUPS untuk selanjutnya dihapuskan pinjaman terlebih dahulu harus;

- 1) Membentuk tim khusus yang terdiri dari tim PKBL pusat dan daerah serta dibantu oleh anggota pengaman, untuk melakukan;
 - (a) Data ulang mitra binaan yang macet.
 - (b) Kelengkapan kontrak dan pendukung.
 - (c) Jaminan (surat berharga)
 - (d) Pengecekan mitra binaan yang terkait.
- 2) Untuk mitra binaan yang telah macet lebih dari 3 (tiga) tahun dan setelah dilakukan langkah-langkah sesuai dengan surat No.109/XII/4/KA-2006, tanggal 7 desember 2006, masih ada itikad baik maka perlu dibuat addendum kontrak dengan memperhitungkan pokok dan bunga yang masih belum dibayar.
- 3) Apabila mitra binaan benar-benar failit, tidak bisa lagi membayar kewajiban bisa menyita jaminan sesuai dengan kontrak, apabila jaminan tidak ada dan cukup material selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;
 - (a) Apabila mitra binaan benar-benar failit, tidak bisa lagi membayar kewajibannya bisa menyita jaminan sesuai dalam kontrak untuk dilakukan lelang jaminan, dan hasilnya disetorkan ke PKBL sebagai pembayaran kewajiban mitra binaan.
 - (b) Jika merupakan tindak pidana (penipuan, pencurian, penggelapan dan tindak kriminal lainnya) dilaporkan ke pihak yang berwenang (polisi).
 - (c) Jika merupakan perdata, maka diajukan ke pengadilan dengan upaya penagihan intensif.
 - (d) Pada pelaksanaan butir 2 dan 3 tersebut harus dilampiri secara lengkap;
 - (1) Berita acara

- (2) Surat pernyataan dari pihak yang bersangkutan, diketahui oleh RT / RW samapai kelurahan.

Sedangkan untuk penghapusan piutang ini tim PKBL PT KAI DAOP VII Madiun sendiri melakukan survey tentang penyebab terjadinya piutang, dan selanjutnya sandainya mitra binaan tidak sanggup untuk membayar pinjaman harus mengajukan penghapusan piutang dengan membuat surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat pemda setempat. Selanjutnya yang menentukan pembebasan piutang adalah RUPS.

4.1.2.2.3 Evaluasi

1) Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mitra binaan, PT KAI DAOP VII Madiun melakukan monitoring terhadap faktor-faktor yang di jadikan indikator untuk melihat perkembangan usaha mitra binaannya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Perkembangan mitra usaha
 - 1) Mendata tentang omset mitra binaan.
 - 2) Mendata aset
 - 3) Mendata jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah dibina
- b) Keberhasilan pengembalian
 - 1) Ketepatan pengembalian pinjaman
 - 2) Kemampuan melakukan pengembalian pinjaman.
- c) Penyebab terjadinya tunggakan
 - 1) Permasalahan manajemen
 - 2) Permasalahan pengelolaan keuangan

Waktu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mitra binaan dilakukan secara berkala. Pelaksanaan pengawasan mitra binaan yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VII Madiun dilakukan dengan mengumpulkan mitra-mitra binaan ke kantor PT KAI DAOP VII Madiun dan selanjutnya dilakukan sharing mengenai permasalahan dan perkembangan usaha dari mitra binaan tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Margono (Kamis, 16 April 2009) sebagai berikut:

“pengawasan yang kita lakukan tidak dengan melototi mitra binaan tersebut mas, tapi biasanya kita mengumpulkan mitra binaan dan kemudian kita sharing mengenai keberadaan usahanya usahanya”.

2) Pembinaan

Berdasarkan hasil pengawasan mitra binaan, PT KAI DAOP VII melakukan pembinaan terhadap mitra binaan. Pembinaan yang dilakukan meliputi :

a) Pembinaan manajemen.

Pembinaan manajemen dilakukan terkait dengan usaha peningkatan mutu produk dan pemasaran. Pembinaan manajemen yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- 2) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
- 3) menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
- 4) menyediakan modul manajemen usaha kecil;
- 5) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

b) Pembinaan pembukuan.

Dalam rangka penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh para mitra binaan jarang yang melakukan kegiatan pembukuan. Akibatnya tidak jelas dalam penggunaan keuangan oleh mitra binaan. Agar program kemitraan ini dapat berlangsung dengan baik dengan indikator perkembangan usaha mitra binaan dilakukanlah pembinaan pembukuan, agar jelas penggunaan keuangan dari mitra binaan. Pembinaan pembukuan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyuluhan dalam pembuatan neraca.
- 2) Memberikan penyuluhan dalam pembuatan laporan keuangan.
- 3) Memberikan penyuluhan dalam penggunaan anggaran.

4.1.2.3 Manfaat dari Program Kemitraan

Program kemitraan selain merupakan suatu rangkaian proses, dibalik semua itu terdapat suatu manfaat yang diperoleh baik oleh mitra binaan maupun bagi PT

KAI DAOP VII Madiun sebagai pelaksana dari kegiatan kemitraan ini. Berikut beberapa manfaat dari program kemitraan ini :

a) Bagi mitra binaan

- 1) Setelah menjadi mitra binaan PT KAI DAOP VII Madiun, perkembangan usaha meningkat secara perlahan namun pasti.
- 2) Peningkatan jumlah tenaga kerja.
- 3) Peningkatan aset dan omset usaha.
- 4) Peningkatan pemahaman dibidang manajemen dan pembukuan.

Selain yang dijelaskan diatas, bagi masyarakat sekitar mitra binaan PT KAI, dengan penambahan tenaga kerja dari mitra binaan maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka sehingga pengangguran bisa berkurang dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

b) Bagi PT KAI DAOP VII Madiun

Manfaat yang diperoleh dari program kemitraan yang dijalankan oleh PT KAI DAOP VII Madiun bukanlah materil seperti yang diterima oleh mitra binaan, tetapi manfaat segi immateril. Manfaat bagi PT KAI DAOP VII Madiun antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pencitraan KAI dalam rangka untuk menciptakan image KAI yang lebih baik di mata masyarakat.
- 2) Sebagai kepedulian kepada masyarakat.
- 3) Lebih dikenal oleh masyarakat luas.
- 4) Mensukseskan pembangunan nasional.
- 5) Adapun manfaat khusus yaitu untuk perlindungan terhadap wilayah KAI.

Seperti dikutip dari pernyataan bapak Margono (Kamis, 16 April 2009):

“Salah satu manfaat bagi PT KAI adalah untuk pengamanan wilayah KAI, karena wilayah kita cukup luas jadi dengan adanya kemitraan ini bisa memberikan keamanan bagi wilayah KAI bagi orang atau pihak yang ingin mencelakakan para pengguna jasa KAI.”

4.1.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan Usaha Kecil Dan Menengah

1) Faktor pendukung dalam program kemitraan

Pada pelaksanaannya program kemitraan PT KAI dengan usaha kecil dan menengah tidak berjalan dengan begitu saja tanpa adanya faktor-faktor yang

mendukung program tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sri Hartanto, faktor-faktor pendukung tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a) Faktor internal

- (a) Peraturan menteri BUMN no. PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah dan program bina lingkungan.

Peraturan ini menjadi dasar dari pelaksanaan program kemitraan yang mendikan program ini sebagai kewajiban bagi seluruh BUMN.

- (b) Keputusan menteri BUMN no. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 juni tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN.

Dengan adanya kepusan ini maka dengan pelaksanaan program kemitraan ini dapat diukur tingkat kesehatan BUMN pembina dengan indikator tingkat koloktibilitas dan tingkat efektivitas.

- (c) Kemampuan manajemen dan SDM dari PT KAI yang mendukung untuk melaksanakan program kemitraan.

- (d) Adanya koordinasi yang baik di PT KAI (persero).

b) Faktor eksternal

- (a) Peranan masyarakat yang mendorong kelancaran program kemitraan.

2) Faktor penghambat dalam program kemitraan

Dalam suatu proses disamping terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat, dan faktor yang menghambat program kemitraan antara lain sebagai berikut:

a) Faktor internal

Hampir tidak ada faktor penghambat dari segi internal yang dihadapi oleh tim pelaksana kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun, karena penghambat justru banyak dari perilaku mitra binaan.

b) Faktor eksternal

- (a) Kredit macet yang ditimbulkan oleh mitra binaan yang kurang memiliki tanggung jawab.

- (b) Budaya hidup boros dan konsumtif yang menjadi budaya dari masyarakat.

- (c) Budaya kurang menyisihkan penghasilan dan menabung.

- (d) Jiwa kewirausahaan yang masih rendah.
- (e) Kondisi pasar yang tidak mendukung

4.1.2.5 Indikator Keberhasilan

Dalam mekanisme pelaksanaan program kemitraan ini ditentukan indikator keberhasilan dalam program kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun dengan UKM, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan mitra binaan. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi bisa dilihat bahwa daerah Madiun dan sekitarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. Seperti dijelaskan oleh bapak Margono (Jumat, 8 Agustus 2009) berikut ini :

"Ya kita melihat keberhasilan dari program ini tentunya dari tingkat pertumbuhan ekonomi selain perkembangan dari mitra kita mas, jika ekonomi tumbuh positif bisa dikatakan program ini berhasil berjalan dengan baik, meskipun ada dari beberapa mitra yang mengalami kegagalan usaha."

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006
	Kabupaten			
1	Pacitan	3,19	4,31	5,10
2	Ponorogo	4,47	4,87	5,40
3	Trenggalek	4,02	4,96	5,15
4	Tulungagung	5,70	6,46	6,13
5	Blitar	4,72	6,06	5,65
6	Kediri	2,63	3,31	5,56
7	Malang	5,97	5,99	6,17
8	Lumajang	5,92	5,53	5,81
9	Jember	4,75	5,85	5,70
10	Banyuwangi	4,30	5,26	5,94
11	Bondowosao	5,14	5,40	5,30
12	Situbondo	4,74	5,65	5,57
13	Probolinggo	4,77	5,40	5,77
14	Pasuruan	5,75	6,36	6,16
15	Sidoarjo	6,14	7,48	5,94
16	Mojokerto	5,81	6,51	6,06
17	Jombang	5,72	6,11	5,83
18	Nganjuk	5,78	6,78	6,22
19	Madiun	3,51	5,35	5,81

20	Magetan		4,43	5,17	5,12
21	Ngawi		4,62	4,51	5,63
22	Bojonegoro		5,64	8,82	6,28
23	Tuban		3,60	5,36	5,99
24	Lamongan		4,60	5,93	5,59
25	Gresik		7,05	8,52	6,75
26	Bangkalan		4,64	5,34	5,55
27	Sampang		3,91	4,87	5,21
28	Pamekasan		3,72	4,30	5,24
29	Sumenep		3,04	2,95	5,84
	Kota				
30	Kediri		7,29	0,43	0,66
31	Blitar		6,30	6,45	6,05
32	Malang		6,95	5,75	6,36
33	Probolinggo		6,13	6,83	6,26
34	Pasuruan		5,96	5,97	6,20
35	Mojokerto		6,55	6,00	6,65
36	Madiun		4,99	5,93	6,24
37	Surabaya		6,71	6,93	6,99
38	Batu		6,56	7,08	6,25
	Jawa Timur		5,83	5,84	5,80

Sumber : www.bps.go.id

Selanjutnya perkembangan dari mitra binaan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun setelah terjalin hubungan kemitraan juga merupakan indikator keberhasilan program kemitraan. Perkembangan usaha ini dilihat dari peningkatan asset, omzet dan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah program kemitraan. Meskipun tidak semua mitra binaan mengalami perkembangan usaha tetapi lebih dari 50% jumlah usaha kecil dan menengah yang dibina oleh PT KAI DAOP (Persero) VII Madiun mengalami perkembangan usahanya.

Berikut ini adalah tabel perkembangan usaha dari mitra binaan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun.

Tabel 5. Perkembangan Mitra Binaan

No	NAMA MITRA BINAAN	Jenis Usaha	SEBELUM DIBINA			SETELAH DSBINA			KET		
			ASET (Rp)	OMSET		TENAGA KERJA	ASET (Rp)	OMSET		TENAGA KERJA	
				Vol	Rp			Vol			Rp
	LANCAR										
1	Sumber urip	Prdg	300.000.000	1.008.000.000	12	315.000.000	1.128.960.000	12			
2	Café mini mentari	Prdg	40.000.000	63.911.500		48.000.000	79.889.375				
3	Catering liska	Jasa	100.000.000	175.000.000		120.000.000	218.750.000				
4	Waris kedai	Perdg	207.000.000	300.000.000		288.400.000	375.000.000				
5	Took ABC	Perdg	15.000.000	144.000.000		15.000.000	144.000.000				
6	Wartel Ku	Jasa	70.000.000	54.000.000	6	70.500.000	54.000.000	6			
7	Took nirwana	Prdg	54.000.000	201.600.000	4	54.000.000	201.600.000	4			
8	Butako	Prdg	19.200.000	48.000.000		19.200.000	48.000.000				
9	Took bu siswo	Prdg	40.500.000	23.700.000		40.500.000	23.700.000				
10	Kios jasmadi	Prdg	230.000.000	216.000.000	2	241.500.000	237.600.000				
11	Ending Suprapti	Prdg	88.500.000	315.000.000	3	88.500.000	315.000.000				
12	Toko Agung L										
13	Took Ar-Rizqi	Prdg	10.000.000	120.000.000		10.000.000	120.000.000	2			
14	Lintang putra seluler	Prdg	35.000.000	900.000.000	2	36.750.000	990.000.000				
15	Stasiun handphone	Prdg	104.000.000	1.080.000.000	3						
16	Pers. Genteng pres	Prdg	57.500.000	90.000.000	2						

MACET Bengkel mulyadi Karya handayani Cahaya mandiri Pengrajin emas Bengkel kartika Toko manisrejo Angdes Ud. Rimba mulya Depot "sumber Rasa" Bengkel "Restu" Konfeksi	Jasa	33.000.000	100.000.000					
	Prdg	26.500.000	12.000.000					
	Prdg	25.500.000	28.800.000					
	Prdg	17.000.000	7.200.000					
	Prdg	1.600.000	4.800.000					
	Prdg	30.000.000	18.000.000					
	Jasa	80.000.000	21.600.000					
	Prdg	25.000.000	16.000.000					
	Prdg	153.00.000	37.800.000					
	Jasa jasa	18.000.000 22.800.000	12.000.000 750.000					
JUMLAH		1.679.600.000	3.318.161.500		1.307.350.000	3.936.499.375		

PEMBAHASAN

4.2.1 Bentuk kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan UKM

1) Pinjaman modal

Dalam rangka perwujudan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan menyukseskan pembangunan nasional terutama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan PT KAI DAOP VII melakukan program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah. Bentuk dari program kemitraan PT KAI DAOP VII adalah dengan memberikan pinjaman modal kepada usaha kecil dan menengah. Pinjaman diberikan kepada UKM yang menjadi mitra binaan dari program kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun. Mitra binaan mengajukan permohonan untuk menjadi mitra binaan agar bisa mendapatkan pinjaman modal yang disesuaikan dengan jumlah anggaran dari PT KAI DAOP VII Madiun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pasal 25 ayat (2), “Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi.”

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut Menurut Partomo (2002:31-32), pola kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah, antara lain:

- 1) *Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar yang di dalamnya usaha besar bertindak sebagai inti dan UKM sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan modal, bimbingan teknis, dan pemasaran hasil produksi.*
- 2) *Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar, di mana UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.*
- 3) *Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara UKM dan usaha besar, di mana usaha besar memasarkan hasil produksi UKM dan UKM memasok kebutuhan yang diperlukan usaha besar sebagai mitranya.*
- 4) *Pola waralaba adalah hubungan kemitraan di mana usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusinya kepada penerima waralaba (UKM) dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.*
- 5) *Pola keagenan adalah hubungan kemitraan di mana UKM memberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha besar sebagai mitranya.*

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan saat ini sebagai gerakan ekonomi kerakyatan memberikan kontribusi yang besar dalam PDB, akan tetapi disamping itu UKM juga mempunyai kelemahan terutama dalam hal permodalan. Seperti yang diungkapkan Suhendar Sulaeman (2004:116), bahwa berdasarkan hasil riset kementerian KUKM dan BPS menyebutkan bahwa dari 72,47% UKM yang bermasalah, 51,09% disebabkan karena masalah permodalan. Sedangkan menurut Titik Sartika Pratomo dan Abd Rahman Soejoedono (2004:30), untuk mengatasi masalah UKM adalah dengan melakukan kemitraan, bantuan keuangan dan modal ventura.

Dalam pemberian pinjaman modal usaha pada program kemitraan PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun dengan usaha kecil dan menengah, para mitra binaan yang mengalami kendala dalam pengembalian pinjaman dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b) Kurang lancar adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sampai dengan 1 (satu) hari dan belum 180 (seratus delapan puluh) hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- c) Diragukan adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- d) Macet adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Untuk mengatasi permasalahan pinjaman yang bermasalah tersebut PT KAI DAOP VII Madiun melakukan langkah rescheduling dan reconditioning. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Dewi (2006:16-17),

Salah satu cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan beberapa metode, yaitu:

1. Rescheduling yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran ataupun tidak.

2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

3. Restructuring yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Dengan adanya kemitraan usaha yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VII Madiun, melalui bantuan pinjaman modal diharapkan UKM yang berada pada wilayah kerja PT KAI DAOP VII Madiun bisa tumbuh berkembang menjadi usaha yang mandiri dan bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat sekarang ini.

4.2.2 Mekanisme pelaksanaan program kemitraan PT KAI DAOP VI Madiun dengan UKM

1) Perencanaan

Program kemitraan PT KAI dengan usaha kecil dan menengah dilakukan seluruh wilayah kerja yang tersebar di Indonesia, pelaksanaan operasional oleh direksi yang kemudian dilimpahkan kepada tim pelaksana yang terdiri dari tim pelaksana tingkat pusat dan tim pelaksana tingkat divisi/daerah.

Dalam proses pembuatan perencanaan, dilakukan oleh internal PKBL sebagai bagian yang paling berkompeten bagi pelaksanaan Program kemitraan. Dalam perencanaan sendiri terdapat syarat-syarat dalam pemberian pinjaman modal. Hal ini dilakukan untuk menilai calon mitra binaan yang bisa melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan proposal pengajuan pinjaman oleh mitra binaan. Disinilah para mitra binaan diseleksi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan surat keputusan dari direksi PT KAI (Persero). Sebelumnya telah dilakukan pembuatan rencana kerja dan anggaran serta penyediaan dana dan sistem perbankan. Sehingga besarnya dana yang nantinya akan dipinjamkan kepada mitra binaan yang layak bina berdasarkan syarat pemberian pinjaman disesuaikan dengan proposal anggaran yang diajukan oleh tim pelaksana program kemitraan tingkat divisi/daerah dalam hal ini PKBL PT

KAI DAOP VII Madiun. Dalam perencanaan juga mengatur mengenai besarnya bunga pinjaman dan lamanya program kemitraan antara PT KAI dengan mitra binaannya.

Agar perencanaan suatu program dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka menurut Bintoro (1976:57-58) terdapat tahap dalam suatu perencanaan tersebut, yaitu:

“Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau review ini berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana (review before take off) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan sebelumnya (review of performance). Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada dan potensi prospek yang bisa dikembangkan.

Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut dengan forecasting. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai penelitian dan teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.

Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini sering kali nilai nilai politik, sosio masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana. Dilihat dalam suatu kerangka yang lebih luas berdasarkan asas konsistensi dan prioritas.

Identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijakan atau policy mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Untuk bisa lebih operasionalnya rencana-rencana kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasarkan pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini berdasarkan opportunity cost dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan indentifikasinya didukung oleh feasibility studies dan survai-srvai pendahuluan. Penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan tersebut pada umumnya dilakukan secara sektoral. Dengan demikian juga dilakukan penentuan sasaran-sasaran sektoral.

Tahap terakhir daripada penyusunan rencana ini adalah persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan disin i mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan di bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.”

Dalam proses rencana program kemitraan yang dijalankan oleh PT KAI DAOP VI Madiun dengan UKM, bertujuan untuk mengembangkan UKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Dalam pelaksanaan PT KAI menentukan syarat-syarat dengan melihat kondisi mendatang yang akan dihadapi sehingga program kemitraan ini dapat terus berjalan. Dalam penentuan kebijakan semua ditentukan

dari kebijakan pusat yaitu melali surat keputusan direksi PT Kereta PI Indonesia (Persero).

2) Pelaksanaan

Program kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun pada tahun 2008 telah membina 48 mitra binaan yang tersebar di wilayah daerah operasi Madiun. Dalam pelaksanaannya PT KAI banyak mengalami hambatan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal. Akan tetapi dalam rangka perwujudan tanggung jawab sosial dan meningkatkan kondisi dari UKM agar bisa terus maju tumbuh dan berkembang semua tantangan dan hambatan tersebut bisa di hadapi dengan baik. Pada tahap ini mitra binaan program kemitraan PT KAI DAOP VII selain mengisi form pendaftaran dan pengajuan proposal sebagai mitra binaan, calon mitra binaan juga melewati seleksi layak bina. Penilaian kelayakan usaha yang dilakukan secara cermat dan teliti akan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan usaha kecil dan menengah dan dapat memperkirakan ancaman dan peluang yang dapat diraih dimasa datang. Setelah mitra binaan layak untuk bina maka dilakukan perjanjian kontrak kerja antar PT KAI dengan UKM dan sekanjutnya dilakukan penyaluran dana program kemitraan ini.

Tugas Tim Operasional PKBL PT KAI DAOP VII adalah menerapkan studi kelayakan terhadap calon anggota mitra binaan, dimana point-point penting yang tertuang dalam draft perencanaan kriteria layak bina disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya dilapangan. Salah satu kendala dalam proses pelaksanaan ini adalah letak/lokasi industri kecil calon mitra binaan yang akan disurvei, dikarenakan tersebar diseluruh wilayah nusantara, namun hal tersebut sedikit teratasi dengan adanya pembagian daerah operasional PT KAI DAOP VII. Selain memberikan pinjaman dalam pelaksanaan program kemitraan in PT KAI juga wajib untuk melakuan penagihan pinjaman kepada mitra binaan dan juga membuat laporan keuangan program kemitraan dan selanjutnya dilaporkan ke pusat.

Agar dapat berjalan dengan baik, program kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun melakukan koordinasi dengan pihak PT KAI yang berada dekat dengan daerah opsai Madiun. Seperti yang dijelaskan oleh Bintoro (1974:198), *“sering kali hambatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan program pembangunan*

disebabkan karena kurangnya koordinasi.” Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bintoro (1974:198-199):

“Hal yang tidak kurang pentingnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program di dalam suatu sektor atau antar sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga. Pertama, perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor atau antar sektor tersebut. Kedua, perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dengan ini diharapkan kejelasan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing badan/lembaga yang berhubungan. Program koordinatif ini diusahakan sedemikian rupa sehingga saling menunjang untuk mencapai hal yang merupakan kepentingan bersama. Ketiga, dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini diperlukan bentuk dan cara kerja masing-masing organisasi yang sesuai dan jelas. Seringkali perlu diperhatikan tahap-tahap pelaksanaannya, misalnya tahap peralihan, tahap konsolidasi dan seterusnya. Keempat, perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan bentuk tanggung jawab koordinasi yang jelas. Kelima, perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya.”

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kemitraan ini, pelaksanaan program kemitraan dilakukan per daerah operasi, jadi disamping mudah dalam pengkoordinasian juga agar program kemitraan ini bisa merata. Berikut adalah pembagian wilayah kerja dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terbagi dalam 9 wilayah daerah operasi :

- a) DAOP I Jakarta
- b) DAOP II Bandung
- c) DAOP III Cirebon
- d) DAOP IV Semarang
- e) DAOP V Purwokerto
- f) DAOP VI Yogyakarta
- g) DAOP VII Madiun
- h) DAOP VIII Surabaya
- i) DAOP IX Jember

3) Evaluasi

Proses evaluasi berupa pengawasan dan evaluasi terhadap Mitra Binaan, hal tersebut dimaksudkan agar terjalin korelasi yang baik antara pihak yang PKBL sebagai Pembina dan Mitra Binaan sebagai pihak yang dibina. Sebagai konsekuensi dari proses evaluasi ini, mitra binaan diwajibkan mengirim laporan perkembangan usahanya setiap triwulan (3 bulanan) kepada BUMN pembina seperti tercantum dalam Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007.

Seperti yang dijelaskan oleh Bintoro (1974:204),

“Untuk kepentingan pelaporan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan pada umumnya, didisain suatu format laporan tertentu. Format laporan itu memuat data-data perkembangan, sesuai dengan rencana kerja dari program maupun proyek pembangunan yang bersangkutan. Laporan dapat memuat pelaksanaan kegiatan fisik dan ada pula yang digabung dengan laporan pelaksanaan pembiayaannya.”

Selain itu dalam menindaklanjuti adanya mitra binaan yang usahanya tidak bisa berkembang PT KAI melakukan pembinaan dalam segi manajerial dan juga pembukuan. Hal ini dilakukan agar nantinya mitra binaan yang belum bisa berkembang bisa melakukan perbaikan dalam usahanya. Sejauh ini evaluasi yang dilakukan oleh Tim Operasional PKBL kepada mitra binaan banyak menemukan peningkatan-peningkatan yang diperoleh oleh mitra binaan, hal ini bisa dilihat dari perkembangan usaha dari mitra binaan.

Bintoro (1976:60), *“Evaluasi ini membantu dalam kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, sering kali disebut sebagai concurrent review.”* Kemudian dijelaskan lebih lanjut, *“bahwa dari hasil evaluasi dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan program itu sendiri.”*

Dalam pelaksanaan evaluasi PT KAI DAOP VII Madiun setelah mengetahui adanya mitra binaan yang tidak berkembang, PT KAI kemudian melakukan pembinaan kepada mitra binaan tersebut. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Bintoro di atas.

4.2.3 Manfaat program kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan UKM

Program kemitraan oleh PT KAI DAOP VII Madiun, merupakan sebuah kerjasama dengan UKM yang saling menguntungkan dan saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Manfaat yang diperoleh oleh UKM sebagai objek program kemitraan lebih banyak berupa materiil, hal ini bisa dilihat dari perkembangan mitra binaan itu sendiri, dengan adanya peningkatan jumlah omset, aset dan tentunya tenaga kerja. hal ini sebagai pewujudan PT KAI dalam menyukseskan pembangunan nasional dengan mengembangkan UKM sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan yang bisa menggerakkan perekonomian nasional. Dalam UU No. 19 tahun 2003 pasal 2 ayat (1) poin e dijelaskan, “bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”.

Selain itu, karena hal ini merupakan kerjasama mutualisme program kemitraan ini juga memberikan manfaat kepada PT KAI DAOP VII Madiun selaku pembina dari program ini. Di samping untuk menciptakan brand image PT KAI di tengah masyarakat, manfaat yang paling penting adalah untuk pengamanan wilayah dari PT KAI karena luasnya wilayah operasional PT KAI DAOP VII ini dan kurangnya tenaga untuk mengawasi wilayah tersebut. Dengan adanya program kemitraan ini, masyarakat akan ikut terlibat dalam pengamanan wilayah PT KAI ini. Meskipun manfaat yang diperoleh PT KAI hanya berupa imateriil, tetapi hal ini sangat berguna bagi perjalanan PT KAI sekarang dan masa yang akan datang. Manfaat yang diperoleh oleh PT KAI DAOP VII adalah berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan BUMN. Seperti dalam KEPMEN BUMN No : KEP-100/MBU/2002 pasal 3 ayat (2) dijelaskan:

“Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan meliputi penilaian:

- a. Aspek keuangan.
- b. Aspek operasional.
- c. Aspek administrasi”.

Sedangkan untuk indikator BUMN yang melakukan program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dengan melihat tingkat kolektibilitas dan tingkat efektivitas penyaluran.

Menurut Sulistiyani (2004:130), “tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih dari baik, dengan saling memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada pihak yang saling dirugikan atau merugikan.” Sedangkan menurut Prawirokusumo (2001:13), “kemitraan antar usaha kecil dan menengah dengan Usaha Besar dengan mengikuti prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kemitraan yang berkembang baik hendaknya tidak ada unsure belas kasih (*charity*) dari UB kepada UKM.”

4.2.4 Faktor pendukung dan penghambat program kemitraan PT KAI DAOP VII Madiun dengan UKM

Faktor pendukung dan penghambat program kemitraan adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesuksesan program kemitraan PT KAI dengan UKM. Dengan adanya evaluasi terhadap kegiatan kemitraan ini, terdapatlah faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program kemitraan PT KAI dengan UKM. Selama ini banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh PT KAI DAOP VII Madiun, salah satunya adalah kredit dari mitra binaan yang macet. Hal ini tentunya sangat mengganggu kelancaran program kemitraan yang dijalankan oleh PT KAI DAOP VII Madiun. Karena akan mempengaruhi jumlah dana yang akan disalurkan pada periode selanjutnya. Akan tetapi tim pelaksana program kemitraan ini mampu meminimalisir permasalahan yang terjadi dengan faktor pendukung dari pelaksanaan program kemitraan ini salah satunya adalah kemampuan manajemen dan SDM dari PT KAI DAOP VII Madiun, sehingga sampai saat ini program kemitraan masih bisa berjalan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bentuk kemitraan yang diberikan oleh PT KAI DAOP VII Madiun tidak hanya dalam bentuk pinjaman modal selain itu juga dalam bentuk ilmu pengetahuan tentang proses manajerial serta pembukuan. Akan tetapi dalam pelaksanaan kemitraan ini masih banyak usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah operasional PT kereta api indonesia DAOP VII yang belum terjaring dalam proses kemitraan hal ini dikarenakan banyak UKM yang tidak mengetahui adanya program kemitraan yang dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia DAOP VII Madiun. Hal ini karena informasi tentang program kemitraan ini tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Di samping kurang transparan dalam program kemitraan, dana dari PT Kereta api Indonesia DAOP VII Madiun yang digunakan untuk program kemitraan ini tidaklah besar.
- 2) Proses Program Kemitraan melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan program kemitraan ini ada sebagian mitra binaan yang mogok artinya tidak bisa melanjutkan usaha dan tidak bisa mengembalikan pinjaman modal yang diberikan PT KAI DAOP VII Madiun, hal ini tentunya akan mengganggu jalannya program kemitraan, karena dana program kemitraan ini berasal dari laba PT KAI yang juga berasal dari cash flow program kemitraan ini. Tidak adanya payung hukum yang menangani masalah pinjaman-pinjaman macet ini lah yang membuat PT KAI DAOP VII Madiun tidak bisa berbuat banyak dalam penarikan piutang kepada mitra binaan.
- 3) Manfaat yang diperoleh mitra binaan berupa terjadinya perkembangan usaha baik dari segi pemanbahan aset, omzet maupun jumlah tenaga kerja usaha kecil dan menengah.
- 4) Dengan adanya dukungan baik internal maupun eksternal, maka hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun serasa tak berarti, hal ini disebabkan baiknya manajemen dari PT KAI DAOP (Persero)

VII Madiun. Dalam pelaksanaan kemitraan ini PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun mempunyai tim khusus yang menjalankan program kemitraan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Program Pembinaan dan Kemitraan serta Bina Lingkungan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun terutama program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, ikut andil dalam upaya pemerintah mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UKM sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan dalam rangka melakukan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan program kemitraan ini masih banyak usaha kecil dan menengah yang belum terjaring hal ini dikarenakan kurangnya transparansi dalam program kemitraan PT KAI (Persero) DAOP VII Madiun dengan UKM. sehingga banyak usaha kecil dan menengah di daerah operasional PT KAI (Persero) DAOP VII yang tidak mengetahui akan adanya program yang bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh UKM seperti masalah permodalan.

Selain itu, dalam pelaksanaan program kemitraan ini tidak adanya payung hukum yang bisa menjadi acuan dalam penarikan piutang macet mitra binaan. Sehingga banyak dana kemitraan ini yang tidak kembali dan akhirnya menghambat bagi penyediaan dana program kemitraan pada periode berikutnya.

5.2 SARAN

Dari uraian kesimpulan diatas, maka yang dapat penulis sarankan adalah :

- 1) Perusahaan pemerintah dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (persero) harus lebih transparan dalam melakukan program kemitraan ini dengan memberikan informasi tentang adanya Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) kepada masyarakat.
- 2) Menambah anggaran operasional dana Kemitraan yang ditujukan untuk perkembangan usaha kecil dan menengah.
- 3) Memberi masukan kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung bagi perkembangan usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achda, B. Taman. 2006. “*Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya Di Indonesia*”, diakses tanggal 18 Oktober 2008 dari <http://www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi.pdf>
- Arifin, Imron, 1994. *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang : Kalimasahada Press.
- Asy'arie, Musa. 2001. *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*. Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam. Dalam Benu, Federick. *Jurnal ekonomi rakyat*. Ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat : suatu kajian konseptual, Artikel - Th. I - No. 10 - Desember 2002.
- Brata, Aloysius gunadi. 2003. *Distribusi spasial UKM di masa krisis ekonomi*. *Jurnal ekonomi rakyat*, artikel – Th II – no. 8 – November 2003.
- Dewi T, Nany. 2006. *Kajian Kredit Usaha Kecil dan Menengah Untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah di Propinsi Sumatra Utara*. Universitas Pajajaran, Bandung.
- Hart, Keith. 1973. *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*. Dalam jurnal of Africa studies. Dalam Bambang Ismawan. *Jurnal ekonomi rakyat*. Ekonomi rakyat : sebuah pengantar, Artikel - Th. I - No. 1 - Maret 2002.
- Ibrahim, 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Ismawan, Bambang. 2002. *Ekonomi rakyat : sebuah pengantar*. *Jurnal ekonomi rakyat*, Artikel - Th. I - No. 1 - Maret 2002.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju.
- Kusuma, D.P. 2006. *Peran BUMN Dalam Mengembangkan Industri Kecil di Daerah*.
- Marbun, B.N. 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Dalam Nurmiyanto, Eko, dkk. *Jurnal Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra*. Perumusan strategi kemitraan menggunakan strategi AHP dan SWOT.
- Marlina, Makna Ani. 2008. “*Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*”, diakses pada tanggal 25 Oktober 2008 dari <http://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/>
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Mubyarto. 2002. *Ekonomi Rakyat Indonesia*. *Jurnal ekonomi rakyat*, Artikel - Th. I - No. 1 - Maret 2002.
- Muljono, Liliawati Eugenia, 1999. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan BUMN*. Jakarta : Havarindo.
- Moleong, J. Lexi. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaka Rhosdakarya.
- Nurmiyanto, Eko. 2004. *Perumusan strategi kemitraan dengan metode AHP dan SWOT*. *Jurnal Teknik Industri*. vol. 6 No. 1 Juni : 47-60.
- Partomo, T.S dan Abdul Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Galia Indonesia.

- Prawirokusumo, Suharto. 2001. *Ekonomi Rakyat, Konsep Kebijakan dan Strategi*. Yogyakarta : BPFE.
- Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan : Batas-Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta : Rajawali.
- Setiawan, Dadang. 2004. *Kemitraan Berbasis Good Governance : Studi Kasus Pembangunan Pasar Kosambi Bandung*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Siagian, S. P. 1970. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bina Grafika.
- Sulaeman, Suhendar. 2004. Pengembangan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi pasar regional dan global. *Infokop*, Nomor 25 Tahun XX 2004. 113-120.
- Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Susiloadi, Priyanto. 2008. Implementasi corporate social responsibility untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. *Spirit public*, volume 4 nomor 2 : 123-130.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tara, Azwir Dainy, 2001, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat. Jakarta : Nusantara Madani. Dalam Benu, Federick. *Jurnal ekonomi rakyat*. Ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat : suatu kajian konseptual, Artikel - Th. I - No. 10 - Desember 2002.
- Tjokroamidjojo, B. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- . 1977. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung

Internet

- .2002. "Pengkajian Pengembangan Antar UKM Dalam Peningkatan Dan Kinerja Ukm Dalam Perekonomian Nasional", diakses tanggal 9 agustus 2009 dari [http :www.smecda.com/kajian/files/.../Pengk_Peng_Kemitra2002](http://www.smecda.com/kajian/files/.../Pengk_Peng_Kemitra2002)

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
 POSISI TW 1/2008
 DAOP VII MADIUN

A AKUMULASI SUMBER DANA

1. Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba		Rp.916.272.260
2. Akumulasi Penerimaan Pendapatan	Rp.	24.549.891
2.1 Bunga Pinjaman	Rp.	56.793.770
2.2 Bunga Deposito	Rp.	
2.3 Jasa Giro	Rp.	7.970.089
2.4 Pendapatan Lain - lain	Rp.	
Jumlah 2		Rp. 64.763.859
Jumlah Akumulasi Sumber Dana sd. TW.1/2008		Rp. 981.036.119

B Akumulasi Penyaluran Dana

Akumulasi Penyaluran.Dana

sd. TW.IV12007 1.

PINJAMAN

1.1 Sektor Industri	Rp.	
1.2 Sektor Perdagangan	Rp..	656.750.000
1.3 Sektor Pertanian	Rp.	
1.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
1.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
1.6 Sektor Perikanan	Rp.	
1.7 Sektor Jasa	Rp.	154.000.000
1.8.Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Pinjaman		Rp. 810.750.000

2. HIBAH

2.1 Sektor Industri	Rp.	
2.2 Sektor Perdagangan	Rp.	
2.3 Sektor Pertanian	Rp.	
2.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
2.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
2.6 Sektor Perikanan	Rp.	
2.7 Sektor Jasa	Rp.	
2.8 Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Hibah		Rp.

Jumlah Akumulasi Penyaluran sd. TW.1/2008 Rp.810.750.000

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
 POSISI TW 1/2008
 DAOP VII MADIUN

A AKUMULASI SUMBER DANA

1. Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba		Rp. 940.822.151
2. Akumulasi Penerimaan Pendapatan	Rp.	27.874.914
2.1 Bunga Pinjaman	Rp.	59.037.266
2.2 Bunga Deposito	Rp.	
2.3 Jasa Giro	Rp.	8.064.152
2.4 Pendapatan Lain - lain	Rp.	
Jumlah 2		Rp. 67.101.418
Jumlah Akumulasi Sumber Dana sd. TW.1/2008		Rp. 1.007.923.569

B Akumulasi Penyaluran Dana

Akumulasi Penyaluran.Dana

sd. TW.IV12007 1.

PINJAMAN

1.1 Sektor Industri	Rp.	
1.2 Sektor Perdagangan	Rp.	656.750.000
1.3 Sektor Pertanian	Rp.	
1.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
1.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
1.6 Sektor Perikanan	Rp.	
1.7 Sektor Jasa	Rp.	154.000.000
1.8 Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Pinjaman		Rp. 810.750.000

2. HIBAH

2.1 Sektor Industri	Rp.	
2.2 Sektor Perdagangan	Rp.	
2.3 Sektor Pertanian	Rp.	
2.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
2.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
2.6 Sektor Perikanan	Rp.	
2.7 Sektor Jasa	Rp.	
2.8 Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Hibah		Rp.

Jumlah Akumulasi Penyaluran sd. TW.1/2008 Rp.810.750.000

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
 POSISI TW 1/2008
 DAOP VII MADIUN

A AKUMULASI SUMBER DANA

1. Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba		Rp. 940.882.151
2. Akumulasi Penerimaan Pendapatan	Rp. 30.352.065	
2.1 Bunga Pinjaman	Rp. 59.486.039	
2.2 Bunga Deposito	Rp.	
2.3 Jasa Giro	Rp. 8.023.820	
2.4 Pendapatan Lain - lain	Rp.	
Jumlah 2		Rp. 67.509.859
Jumlah Akumulasi Sumber Dana sd. TW.1/2008		Rp. 1.008.332.010

B Akumulasi Penyaluran Dana

Akumulasi Penyaluran.Dana

sd. TW.IV12007 1.

PINJAMAN

1.1 Sektor Industri	Rp.	
1.2 Sektor Perdagangan	Rp.. 701.750.000	
1.3 Sektor Pertanian	Rp.	
1.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
1.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
1.6 Sektor Perikanan	Rp.	
1.7 Sektor Jasa	Rp. 154.000.000	
1.8.Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Pinjaman		Rp. 855.750.000

2. HIBAH

2.1 Sektor Industri	Rp.	
2.2 Sektor Perdagangan	Rp.	
2.3 Sektor Pertanian	Rp.	
2.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
2.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
2.6 Sektor Perikanan	Rp.	
2.7 Sektor Jasa	Rp.	
2.8 Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Hibah		Rp.

Jumlah Akumulasi Penyaluran sd. TW.1/2008 Rp.855.750.000

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
 POSISI TW 1/2008
 DAOP VII MADIUN

A AKUMULASI SUMBER DANA

1. Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba		Rp. 971.174.216
2. Akumulasi Penerimaan Pendapatan	Rp.	29.422.978
2.1 Bunga Pinjaman	Rp.	61.837.557
2.2 Bunga Deposito	Rp.	
2.3 Jasa Giro	Rp.	8.119.827
2.4 Pendapatan Lain - lain	Rp.	
Jumlah 2	Rp.	69.957.384
Jumlah Akumulasi Sumber Dana sd. TW.1/2008	Rp.	1.041.131.600

B Akumulasi Penyaluran Dana

Akumulasi Penyaluran.Dana

sd. TW.IV12007 1.

PINJAMAN

1.1 Sektor Industri	Rp.	
1.2 Sektor Perdagangan	Rp.	751.750.000
1.3 Sektor Pertanian	Rp.	
1.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
1.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
1.6 Sektor Perikanan	Rp.	
1.7 Sektor Jasa	Rp.	164.000.000
1.8 Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Pinjaman	Rp.	915.750.000

2. HIBAH

2.1 Sektor Industri	Rp.	
2.2 Sektor Perdagangan	Rp.	
2.3 Sektor Pertanian	Rp.	
2.4 Sektor Pertemakan	Rp.	
2.5 Sektor Perkebunan	Rp.	
2.6 Sektor Perikanan	Rp.	
2.7 Sektor Jasa	Rp.	
2.8 Sektor Lainnya	Rp.	
Jumlah Hibah	Rp.	

Jumlah Akumulasi Penyaluran sd. TW.1/2008 Rp.915.750.000

DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW. I / 2008
DENGAN KUWALITAS PINJAMAN LANCAR

NO	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNGGAKAN	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(7-9)	12(8-10)
1	Provinsi Jawa Timur a. Kab/Kota Madiun										
1.	Mentari-Josenan-Madiun	Stasiun Madiun	Perdg	15.000.000-	1.700.002			-			
2.	Penjahit Bu Kasino	Jl. Majen Sungkono Gg. Bulu 2 No. 8 Madiun	Jasa	5.000.000-	425.000						
3.	Parkir Sta Madiun	Stasiun Madiun	Jasa	5.000.000-	425.000	303.030		303.030			
4.	Usaha Pracangan V	Jl. Iromiti Madiun	Perdg	-5.000.000-	425.000	606.065	14.390	606.065	14.390		
5.	Toko Karya Usaha	Jl. Sri WibowoNo. 51 Madiun	Perdg	8.000.000-	680.000	727.272	29.091	727.272	29.091		
6.	LPS	Jl. Kompol Sunaryo 12 B Madiun	Perdg	20.000.000-	2.266.667	1.818.183	145.454	1.818.183	145.454		
7.	Percetakan Tunas Karya	Jl. Anggrek No. 15 A Madiun	Perdg	10.000.000-	850.000	1.212.120	106.062	1.212.120	106.062		
8.	Toko Bu Farid	Jl. Sukokarya - Surabayan Madiun	Perdg	20.000.000'	2.266.667	1.818.183	351.514	1.818.183	351.514		
9.	Toko Cindy	Jl. Klegen - Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	909.090	124.243	909.090	124.243		
10.	Penjahit Jl. Bali Madiun	Jl. Bali Gg. 1 Madiun	Jasa	10.000.000	850.000	909.090	122.728	909.090	122.728		
11.	Temak Ikan Gurame	Jl. Candi Sewu Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	909.090	136.365	909.090	136.365		
12.	Temak Ikan	Jl. Branjangan Jiwan - Madiun	Perdg	10.000.000-	850.000	909.090	136.365	909.090	136.365		
13.	Toko Reza	Jl. Sukokarya -	Perdg	10.000.000	850.000	303.030	50.000	303.030	50.000		

	Surabayan Madiun									
JUMLAH MADIUN			138.000.000	13.288.336	10.424.243		10.424.243	1.216.212		
b. Kab. Nganjuk										
1 TokoNur	PasSr Brebek Nganjuk	Perdg.	15.000.000	1.700.002						--
2 Toko Rejo Agung	Dsn Ngreco - Sukorejo - Nganjuk	Perdg.	15.000.000	1.700.000	1.360.604	90.910	1.360.604	90.910		
JUMLAH NGANJUK			30.000.000	3.400.002	1.360.604	90.910	1.360.604	90.910		-
c . Kab/Kota Jombang										
1. TokoAR-RIZQI	Jl. Dr. Sutomo Jombang	Perdg	20.000.000	1.700.000	606.061	100.000	606.061	100.000		-
2. Toko Anugrah	Jl. Madura Jombang	Prdg	12.500.000	1.416.667	1.136.364	83.333	1.136.364	83.333		-
3 . Catering Mia Sari	Jl. Madura Jombang	Perdg	15.000.000	1.700.000	1.363.635	211.365	1.363.635	211.365		-
JUMLAH JOMBANG			47.500.000	4.816.667	3.106.060	394.698	3.106.060	394.698		-
d. Kab. Ponorogo										
1. Stasiun HP	Jl. Soekamo • Harta 225 Ponorogo	Perdg	20.000.000	1.700.000	606.061	100.000	606.061	100.000		-
2. Spider Play Station	Jl. Soekamo - Hatta 225 Ponorogo	Jasa	30.000.000	3.400.000	2.727.273	163.636	2.727.273	163.636		-
JUMLAH PONOROGO			50.000.000	5.100.000	3.333.334	263.636	3.333.334	263.636		-
e. Kab. Magetan										
1. Toko Etnik	Barat - Magetan	Perdg	15.000.000	1.700.000	1.363.635	211.365	1.363.635	211.365		-
JUMLAH MAGETAN			15.000.000	1.700.000	1.363.635	211.365	1.363.633	211.365		-
Jumlah			280.500.000	28.305.005	19.587.876	960.609	19.587.876	2.176.821		-

DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW.I / 2008
DENGAN KUWALITAS MACET

NO	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNG AKAN G	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(7-9)	12(8-10)
1	Propinsi Jawa Timur Kab/Kota Madiun										
	1. BENGKEL MULYADI	Jl. Scndang Kuncen Madiun	Jasa	10.500.000	892.452	5.727.000	272.007	-	-	5.727.000	272.007
	2. KARYA HANDAYANI	Jl.Mliwis Gg. Sarcan No:378 Madiun	Perdngnan	3.000.000	255.000	2.727.273	209.727			2.727.273	209.727
	3. CAHAYA MANDIRI	Jl. Scrayu Timur Madiun	Perdngnan	3.000.000	235.000	1.909.092	79.644			1.909.092	79.644
	4. PENGRAJIN EMAS	Gg. Masjid Madiun	Perdngnan	2.000.000	170.000						
	5. BENGKELKARTIKA	Jl. Arumdal Madiun	Jasa	2.000.000	170.000	1.696.970	119.909			1.696.970	119.909
	6. TOKO MANISREJO	Jl. Tanjung Raya No.33 Madiun	Perdngnan	3.000.000	255.000	2.436.364	194.727			2.436.364	194.727
	7. ANGDES	Jl. Cendrawnsih Gg Murai Madiun	Jasa	2.000.000	170.000	757.880				757.880	
	8. UD. RIMBA MULYA	Jl. Imam Bonjol.Gg Jati Karya Madiun	Perdngnan	5.000.000	425.000	4.242.425	299.515			4.242.425	299.515
	9. Depot "SUMBER RASA"	Jl. Letjen Harjono No.25 Madiun	Perdngnan	2.000.000	170.000	1.515.152	90.000			1.515.152	90.000
	10. BENGKEL "RESTU"	Jl. Ronggo Jumeno Madiun	Jasa	3.000.000	255.000	800.000				800.000	
	11. KONFEKSI	Jl.Serayu Timur 11/4 Madiun	Jasa	3.000.000	255.000	1.441.909				1.441.909	
	12. Wartel Ku	Ds. Teguhan Madiun	Jasa	12.000.000	1.020.000	4.727.280	165.454			4.727.280	165.454
	13. Toko Mantab	Jl. Letjen Ilaryono	Perdng	15.000.000	1.700.000	13.181.818	1.318.182			13.181.818	1.318.182

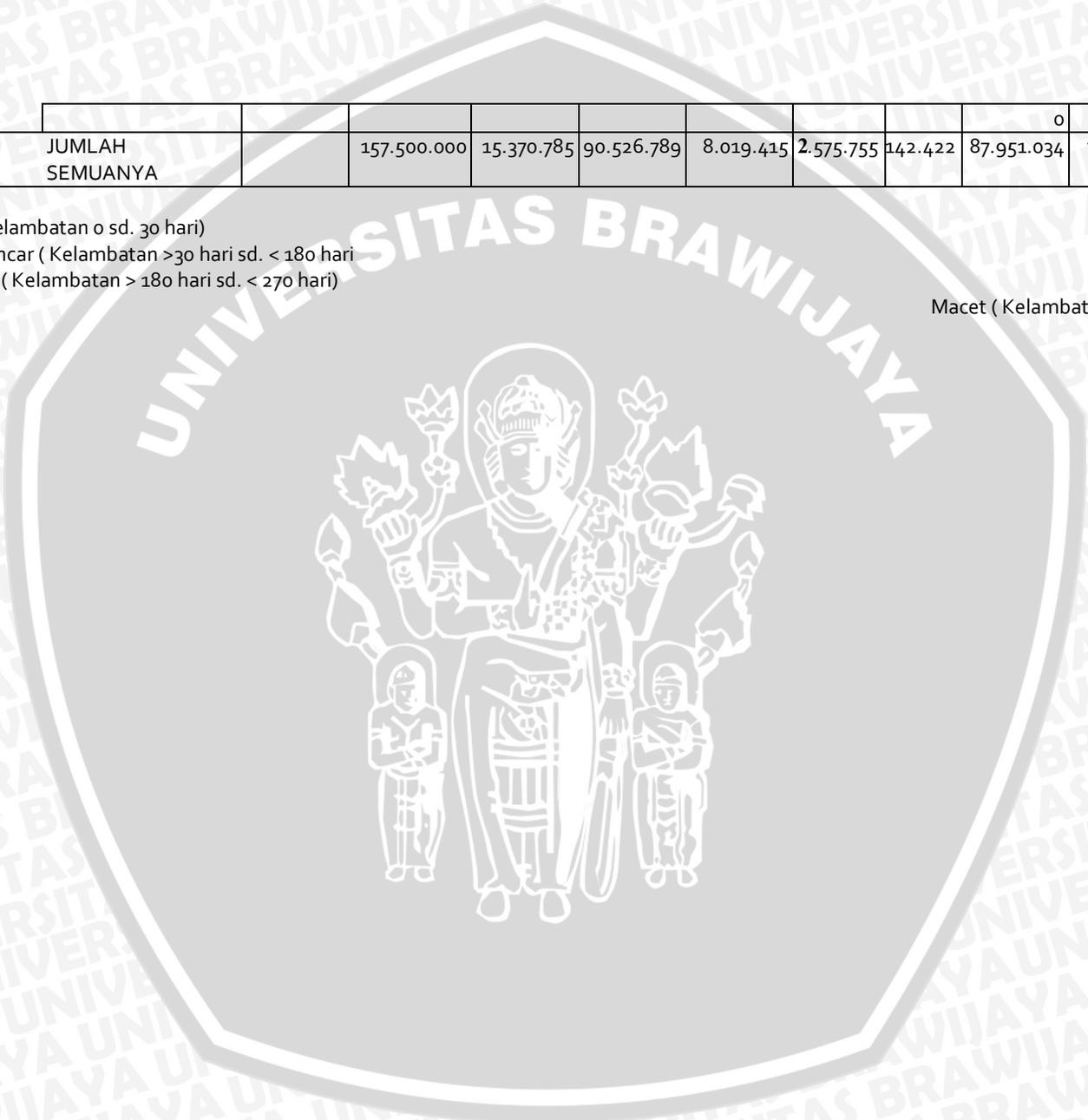
14. Kantin Rosita - Kantor Daop 7 Madiun	Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	6.060.606	590.909			6.060.606	590.909
	Jl. RA KaninrNo. 3	Perdg	20.000.000	2.266.667	9.696.976	1.648.485			9.696.976	1.648.485
15. Perusahaan Golang - Galing Super	Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	6.060.606	590.909			6.060.606	590.909
	Jl. Kalasan No. 1 Madiun	Perdg	20.000.000	2.266.667	9.696.976	1.648.485			9.696.976	1.648.485
JUMLAH MADIUN			95.500.000	9.109.119	56.920.745	4.988.559	-	-	56.920.745	4.988.559
JOMBANG 1 RMSederhana 2 Parkir Stasiun Jombang	Empl. Stasiun Jg	Perdg	10.000.000	850.000	4.545.450	168.178	1.212.120	69.693	3.333.330	98.485
	Jl. Madura Jombang	Jasa	20.000.000	2.266.667	12.121.212	1.737.374			12.121.212	1.737.374
	JUMLAH JOMBANG		30.000.000	3.116.667	16.666.662	1.905.552	1.212.120	69.693	15.454.542	1.835.859
PONOROGO 1 Toko Mentari Ponorogo	Jl. DI Panialtan 102 Ponorogo	Jasa	7.000.000	595.000	4.666.667	478.333			4.666.667	478.333
	JUMLAH PONOROGO		7.000.000	595.000	4.666.667	478.333	-	-	4.666.667	478.333
MAGETAN 1. Persh. Gentcng Pres Barat 2. Toko Barokah Jaya	Ds. Karangsono - Barat - Magetan Ds.	Perdg	10.000.000	849.999	7.272.720	468.181	1.363.635	72.729	7.272.720	468.181
	Karangsono - Barat - Magetan	Perdg	15.000.000	1.700.000	4.999.995	178.790			3.636.360	106.061
	JUMLAH MAGETAN		25.000.000	2.549.999	12.272.715	646.971	1.363.635	72.729	10.909.08	574.242

									0	
	JUMLAH SEMUANYA		157.500.000	15.370.785	90.526.789	8.019.415	2.575.755	142.422	87.951.034	7.876.993

Keterangan :

- Lancar (Kelambatan 0 sd. 30 hari)
- Kurang Lancar (Kelambatan >30 hari sd. < 180 hari)
- Diragukan (Kelambatan > 180 hari sd. < 270 hari)

Macet (Kelambatan > 270 hari)



DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW II/2008
DENGAN KUALITAS LANCAR

1	NAMA MITRA	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNGGAKAN	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-9)	12(8-10)
i	Propinsi Jawa Timur										
	a. Kab/Kota Madiun										
	1. Toko Karya Usaha	Jl. Sri Wibowo No. 51 Madiun	Perdg	8000.000	680.000	727.272	18.182	727.272	18.182	-	-
	2. LPS	Jl. Kopol Sunaryo 12 B Madiun	Perdg	20.000.000	2.266.667	1.818.183	109.091	1.818.183	109.091	-	-
	3. Percetakan Tunas Karya	Jl. Angrek No. 15 A Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	1.212.120	106.062	606.060	43.940	606.060	62.122
	4. Toko Bu Farid	Jl. Sukokarya - Surabayan Madiun	Perdg	20.000.000	2.266.667	1.818.183	351.514	1.212.122	209.091	606.061	142.423
	5. Toko Cindy	Jl. Klegen - Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	909.090	109.092	909.090	109.092	-	-
	6. Penjahit Jl. Bali	Jl. Bali Gg. 1 Madiun	Jasa	10.000.000	850.000	909.090	122.728	909.090	122.728	-	-
	7. Temak Ikan Gurame	Jl. Candi Sewu Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	909.090	122.728	909.090	122.728	-	-
	8. Temak Dean	Jl. Branjangan Jiwan - Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	909.090	122.728	909.090	122.728	-	-
	9. Toko Reza	Jl. Sukokarya - Surabayan Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	909.090	140.910	909.090	140.910	-	-
	JUMLAH MADIUN			108.000.000	10.313.334	10.121.208		8.909.087	998.490	1.212.121	204.545
	b. Kab. Nganjuk										
	1 Toko Rejo Agung	Dsn Ngreco - Sukorejo - Nganjuk	Perdg.	15.000.000	1.700.000	1.360.604	90.910	909.090	51.516	451.514	39.394
	JUMLAH NGANJUK			15.000.000	1.700.000	1.360.604	90.910	909.090	51.516	451.514	39.394
	d. Kab/Kota Jombang										
	1 Toko AR-R1ZQ1	Jl. Dr. Sutomo Jombang	Perdg	20.000.000	1.700.000	1.212.122	190.908	1.212.122	190.908	-	-

2	Toko Anugrah	Jl. Madura Jombang	Prdg	12.500.000	1.416.667	1.136.364	83.333	1.136.364	83.333	-	-
3	Catering Mia Sari	Jl. Madura Jombang	Perdg	15.000.000	1.700.000	1.363.635	211.365	1.363.635	211.365	-	-
JUMLAH JOMBANG				47.500.000	4.816.667	3.712.121	485.606	3.712.121	485.606	-	-
f. Kab. Ponorogo											
1	Stasiun HP	Jl. Soekamo - Hatta 225 Ponorogo	Perdg	20.000.000	1.700.000	1.818.183	281.817	1.818.183	281.817	-	-
2	Spider Play Station	Jl. Soekamo - Hatta 225 Ponorogo	Jasa	30.000.000	3.400.000	3.277.273	109.092	3.277.273	109.092	-	-
JUMLAH PONOROGO				50.000.000	5.100.000	5.095.456	390.909	5.095.456	390.909	-	-
g. Kab. Magetan											
1	Toko Etnik	Barat - Magetan	Perdg	15.000.000	1.700.000	1.363.635	190.911	1.363.635	190.911	-	-
JUMLAH MAGETAN				15.000.000	1.700.000	1.363.635	190.911	1.363.635	190.911	-	-
Jumlah				235.500.000	23.630.001	21.653.024	1.158.336	19.989.389	2.117.432	1.663.635	243.939

**DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW II /2008
DENGAN KWALITAS PINJAMAN MACET**

NO	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNGGAKAN	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-9)	12(8-10)
1	Propinsi Jawa Timur										
	a. Kab/Kota Madiun										
	1 BENGKEL MULYADI	Jl. Sendang Kuncen Madiun	Jasa	10.500.000	892.452	5.727.000	272.007			5.727.000	272.007
	2 KARYA HANDAYANI	Jl.Mliwis Gg. Sarean No:378 Madiun	PERDGN G	3.000.000	255.000	2.727.273	209.727.			2.727.273	209.727
	3 CAHAYA MANDIRI	Jl. Serayu Timur Madiun	PERDGN G	3.000.000	255.000	1.909.092	79.644			1.909.092	79.644
	4 PENGRAJIN EMAS	Gg. Masjid Madiun	PERDGN G	2.000.000	170.000						-
	5 BENGKEL KARTTKA	Jl. Arumdalu Madiun	JASA	2.000.000	170.000	1.696.970	119.909			1.696.970	119.909
	6 TOKO MANISREJO	JL Tanjung Raya No.33 Madiun	PERDGN G	3.000.000	255.000	2.436.364	194.727			2.436.364	194.727
	7 ANGDES	Jl. Cendrawasih Gg Murai Madiun	Jasa	2.000.000	170.000	757.880				757.880	-
	8 UD. RIMBA MULYA	Jl. Imam Bonjol.Gg Jati Karya Madiun	PERDGN G	5.000.000	425.000	4.242.425	299.515			4.242.425	299.515
	9 Depot "SUMBER RASA"	Jl. Letjen HarjonoNo.25 Madiun	PERDGN G	2.000.000	170.000	1.515.152	90.000			1.515.152	90.000
	10 BENGKEL "RESTU"	Jl. Ronggo Jumeno Madiun	Jasa	3.000.000	255.000	800.000	-			800.000	-
	11 KONFEKSI	Jl.Serayu Timur n/4 Madiun	Jasa	3.000.000	255.000	1.441.909		1.441.909		-	-
	12 Wartel Ku	Ds. Teguhan Madiun	Jasa	12.000.000	1.020.000	4.727.280	165.454	1.454.544	83.636	3.272.736	81.818
	13 Toko Mantab	Jl. Letjen Haryono Madiun	Perdg	15.000.000	1.700.000	13.181.818	1.318.182			13.181.818	1.318.182
	14 Kantin Rosita - Kantor Daop 7 Madiun	Jl. RA Kartini No. 3 Madiun	Perdg	10.000.000	850.000	6.060.606	590.909			6.060.606	590.909
	15 Penisahaan Golang - Galing Super	Jl. Kalasan No. 1 Madiun	Perdg	20.000.000	2.266.667	9.696.976	1.648.485			9.696.976	1.648.485
		JUMLAH MADIUN		95.500.000	9.109.119	56.920.745	4.988.559	2.896.453	83.636	54.024.292	4.904.923
	JOMBANG										

1 RMSederhana	Empl. Stasiun Jg	Perdg	10.000.000	850.000	3.333.330	131.813	909.090	36.365	2.424.240	95.448
2 Parkir Stasiun Jombang	Jl. Madura Jombang	Jasa	20.000.000	2.266.667	12.121.212	1.737.374	-	-	12.121.212	1.737.374
JUMLAH JOMBANG			30.000.000	3.116.667	15.454.542	1.869.187	909.090	36.365	14.545.452	1.832.822
PONOROGO										
1 Toko Mentari Ponorogo	Jl. DI Panjaitan 102 Ponorogo	Jasa	7.000.000	595.000	4.666.667	478.333			4.666.667	478.333
JUMLAH PONOROGO			7.000.000	595.000	4.666.667	478.333			4.666.667	478.333
MAGETAN										
1 Persh. Genteng Pres Barat	Ds. Karangsono - Barat - Magetan	Perdg	10.000.000	849.999	7.272.720	468.181			7.272.720	468.181
2 Toko Barokah Java	Ds. Karangsono - Barat - Magetan	Perdg	15.000.000	1.700.000	2.272.725	60.605	1.363.635	45.456	909.090	15.149
JUMLAH MAGETAN			25.000.000	2.549.999	9.545.445	528.786	1.363.635	45.456	8.181.810	483.330
JUMLAH SEMUA			157.500.000	15.370.785	86.587.399	7.864.865	5.169.178	165.457	81.418.221	7.699.408

Keterangan :

- Lancar (Kelambatan 0 sd. 30 hari)
- Kurang Lancar (Kelambatan >30 hari sd. < 180 hari)
- Diragukan (Kelambatan > 180 hari sd. < 270 hari)
- Macet (Kelambatan > 270 hari)

DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW III/2008
DENGAN KUALITAS LANCAR

NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNGGAKAN	
			POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-9)	12(8-10)
Tropinsi Jawa Timur.x. Kab/Kota Madiun										
1 Wartel Ku	Ds. Teguhan Madiun	Jasa	12.000.000	1.020.000	4.727.280					
2 Toko Kiuya Usaha	Jl. Sri Wibowo No. 51 Madiun	Perdgr	8.000.000	680.000	727.729	165.454	363.636	23.636	4.363.644	141.818
3 LPS	Jl. Kumpul Sunaryo 12 B Madiun	Perdgr	20.000.000	850.000	1.815.183	7.266.82.326	72.727	7.266		
4 Percetakan Tunas Karya	Jl. Angrek No. 15 A Madiun	Perdgr	10.000.000	2.266.667	1.815.180	95.457	1.818.183	82.326		
5 Toko Bu Farid	Jl. Sukokarya - Surabayan Madiun	Perdgr	20.000.000	850.000	1.815.183	281.817	1.818.180	95.457		59.091
6 Toko Cindy	Jl. Klegen - Madiun	Perdgr	10.000.000	850.000	905.090	124.243	1.818.183	281.817	303.030	48.485
7 Penjahit Jl. Bali	Jl. Bali Gg 1 Madiun	Jasa	10.000.000	850.000	909.090	122.728	606.060	65.152		62.122
8 Ternak Ikan Gurame	Jl. Candi Sewu Madiun	Perdgr	10.000.000	850.000	909.090	136.365	909.090	74.243		
9 Ternak Ikan	Jl. Branjangan Jiwan - Madiun	Perdgr	10.000.000	850.000	909.092	136.365	606.060	74.243	303.030	
10 Toko Reza 11	Jl. Sukokarya - Surabayan Madiun	Perdgr	10.000.000	850.000		127.274	606.060	136.365	303.030	
							909.092	127.274		
JUMLAH MADIUN			120.000.000	11.333.334			10.181.823	967.779	5.272.734	311.516
Kab.Nganjuk 1 Toko Rejo Agung	Dsn Nzreco - Sukorejo - Nganjuk	Perdgr	15.000.000	1.700.000	1.808.810	78.790	1.818.180	78.790	-	-
JUMLAH NGANJUK			15.000.000	1.700.000	1.818.810	78.790	1.818.180	78.790	-	-
Kab/Kota Jombang										
1 Toko AR-RIZQI	Jl. Dr. Sutomo Jombang	Perdgr	20.000.000	1.700.000	2.424.244	348.483	2.424.244	348.483	11.696.785	979.801
2 Toko Anugrah	Jl. Madura Jombang	Prdgr	12.500.000	1.416.667	757.576	22.727	757.576	22.727		
3 Catering Mia Sari	Jl Madura Jombang	Perdgr	15.000.000	1.700.000	1.363.635	170.456	1.363.635	170.456		
4 RM Sederhana	Empl. Stasiun Jg	Perdgr	10.000.000	850.000	909.092	22.728	909.092	22.728		
5 Parkir Stasiun Jombana	Jl. Madura Jombana	Jasa	20.000.000	2.266.667	12.121.212	1.737.374	424.427	757.573		
JUMLAH JOMBANG			77.500.000	7.933.334	17.575.759	2.301.768	5.878.974	1.321.967	11.696.785	979.801
Kab Ponorogo.									-	-

1 Stasiun HP	Jl. Soekamo - Harta 225 Ponorogo Jl.	Perdgr	20.000.000	1.700.000	1.818.813	254.183	1.818.183	254.183		
2 Spider Play Station	Soekamo" - Harta 225 Ponorogo	Jasa	30.000.000	3.400.000	3.633.364	60.606	3.636.364	60.606		
JUMLAH PONOROGO			50.000.000	5.100.000	5.454.547	314.789	5.454.547	314.789	-	-
g. Kab. Magetan										
1 Toko Etnik	Barat - Magetan	Perdgr	15.000.000	1.700.000	1.363.635	211.365	454.545	59.091	909.090	152.274
2 Toko Barokah Jaya	Ds. Karangsono - Barat - Magetan	Perdgr	15.000.000	1.700.000	2.272.725	60.605			2.272.725	60.605
JUMLAH MAGETAN			30.000.000	3.400.000	3.636.360	271.970	454.545	59.091	3.181.815	212.879
Jumlah			292.500.000	29.466.668	43.939.403	2.967.317	23.788.069	2.742.416	20.151.334	1.504.196



**DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW III / 2008
DENGAN KUALITAS MACET**

NO	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNGGAKAN	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-9)	12 (8-10)
1	Propinsi Jawa Timur a. Kab/Kota Madiun										
1	BENGKEL MULYADI	Jl. Sendang Kuncen Madiun Jl.Mliwis Gg. Sarean No:378 Madiun	Jasa perdgng	10.500.000	892.452	5.727.000	272.007			5.727.000	72.007
2	KARYA HANDAYANI	Jl. Serayu Timur Madiun	prdgng	3.000.000	255.000	2.727.273	209.727			2.727.273	209.727
3	CAHAYA MANDIRI	Jl. Arumdalu Madiun	jasa	3.000.000	255.000	1.909.092	79.644			1.909.092	79.644
4	BENGKEL KARTIKA	Jl. Tanjung Raya No.33 Madiun Jl. Cendrawasih Gg Murai Madiun	perdgng	2.000.000	170.000	1.696.970	119.909			1.696.970	119.909
5	TOKO MANISREJO	Jl. Imam Bonjol.Gg Jati Karya Madiun	jasa	3.000.000	255.000	2.436.364	194.727			2.436.364	194.727
6	ANGDES	Jl. Letjen Harjono No.25 Madiun	perdgng	2.000.000	170.000	757.880	299.515			757.880	2
7	UD. RIMBA MULYA	Jl. Ronggo Jumeno Madiun	jasa	5.000.000	425.000	4.242.425	90.000			4.242.425	99.515
8	Depot "SUMBER RASA"	Jl. Letjen Haryono Madiun	perdgng	2.000.000	170.000	1.515.152	1.318.182			1.515.152	90.000
9	BENGKEL "RESTU"	Jl. RA Kartini No. 3 Madiun	perdgng	3.000.000	255.000	800.000	590.909			800.000	1.
10	Toko Mantab	Jl. Kalasan No. 1 Madiun	perdgng	15.000.000	1.700.000	13.181.818	1.648.485			13.181.818	318.182
11	Kantin Rosita - Kantor Daop 7 Madiun		perdgng	10.000.000	850.000	6.060.606				6.060.606	590.909
12	Perusahaan Golang - Galing Super		jasa perdgng perdgng perdgng	20.000.000	2.266.667	9.696.976				9.696.976	1.648.485
		JUMLAH MADIUN		78.500.000	7.664.119	50.751.556	4.823.105			50.751.556	4.823.105
	PONOROGO										
1	Toko Mentari Ponorogo	Jl. DI Panjaitan 102 Ponorogo	Jasa	7.000.000	595.000	4.666.667	478.333			4.666.667	478.333
		JUMLAH PONOROGO		7.000.000	595.000	4.666.667	478.333			4.666.667	478.333
	MAGETAN										
1	Perh. Genteng Pres Barat	Ds. Karangsono • Barat - Magetan	Perdg	10.000.000	849.999	7.272.720	468.181			7.272.720	468.181
		JUMLAH MAGETAN		10.000.000	849.999	7.272.720	468.181			7.272.720	468.181
		JUMLAH SEMUA		95.500.000	9.109.118	62.690.943	5.769.619			62.690.943	5.769.619

	Madiun										
JUMLAH MADIUN			207.000.000	18728.337	25.691.520		12.954.543	1.200.763	12736.977	887.725	
b. Kab. Nganjuk 1 Toko Rejo Agung	Dsn Ngreco - Sukorejo - Nganjuk	Perdg.	15.000.000	1 700 000	878.789	-	878.789	-	-	-	
JUMLAH NGANJUK			15.000.000	1.700.000	878.789		878.789	-	-	-	
c. Kab/Kota Jombang 1 TokoAR-RIZQI	Jl. Dr Sutomo Jombang	Perdg	20.000.000	1.700.000	2.424.244	348.483	606.061	78.787	1.818.183	269.6%	
2 Toko Anugrah	Jl. Madura Jombang	Prdg	12.500.000	1.416.667	1.136.360	15.155	1.136.360	15.155	-	-	
3 Catering Mia Sari	Jl. Madura Jombang	Perdg	15.000 000	1.700.000	1.363.635	150.001	1.363.635	150.001	-	-	
4 RM Sederhana	Empl. Stasiun Jg	Perdg	10.000.000	850.000	606.070	-	606.070	-	-	-	
5 Parkir Stasiun Jombang	Jl. Madura Jombang	Jasa	20.000.000	2 266.667	12.121.212	1737.374	1.600.000	400.000	7521.212	1337.374	
JUMLAH JOMBANG			77.500.000	7.933.334	17.651.521	2251.013	8312.126	643.943	9.339.395	1.607 070	
d Kab. Ponorogo 1 Stasiun HP	Jl. Soekamo - Hatta 225 Ponorogo	Perdg	20.000.000	1.700.000	2.122.728	227.273	2.122.728	227.273	-	-	
2 Spid-r Play Station	Jl. Soekamo - Hatta 225 Ponorogo	Jasa							-	-	
JUMLAH PONOROGO			20.000.000	1.700.000	2.122.728	227.273	2.122.728	227.273	-	-	
e . Kab. Magetan 1 Toko Etnik	Barat - Magetan	Perdg	15.000.000	1 700.000	1.363.635	211.365	909.090	118.932	454.545	92.433	
2 Toko Barokah Jaya	Ds. Karangsono - Barat - Magetan	Perdg	15.000.000	1.700.000	1.363.635	18.162	909.090	15.132	454.545	3.030	
f. Kab. Kediri 1 Parkiran Alfa	Jl. Raya papar Kedin	Jasa	10.000.000	850 001	I		-				
JUMLAH MAGETAN			40.000.000	4.250.001	2.727.270	229.527	1.818.180	134.064	909.090	95.463	
Jumlah			359.500.000	34.311.67	49.071.82	2.707.81	26.086.3	2.206.04	22.985.4	2.590.25	

					2	8	3	66	3	62	8
--	--	--	--	--	---	---	---	----	---	----	---



**DAFTAR MITRA BINAAN PROGRAM KEMITRAAN SD TW IV / 2008
DENGAN KWALITAS MACET**

NO	N A M A	ALAMAT	JENI S USA HA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REALISASI		TUNGGAKAN	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(7-9)	12(8-10)
1	Propinsi Jawa Timur a. Kab/Kota Madiun										
	1 BENGKEL MULYADI	Jl. Sendang Kuncen Madiun	Jasa	10.500.000	892.452	5.727.000	272.007			5.727.000	272.007
	2 KARYA HANDAYANI	Jl.Mliwis Gg. Sarean No:378 Madiun	Perdag ngan	3.000.000	255.000	2.727.273	209.727			2.727.273	209.727
	3 CAHAYA MANDIRI	Jl. Serayu Timur Madiun	Perdag ngan	3.000.000	255.000	1.909.092	79.644			1.909.092	79.644
	4 BENGKEL KARTIKA	Jl. Arumdaluh Madiun	Jasa	2.000.000	170.000	1.696.970	119.909			-1.696.970	119.909
	5 TOKO MANISREJO	Jl. Tanjjung Raya No.33 Madiun	Perdag ngan	3.000.000	255.000	2.436.364	194.727			2.436.364	194.727
	6 ANGDES	Jl. Cendrawasih Gg Murai Madiun	Jasa	2.000.000	170.000	757.880				757.880	-
	7 UD. RLMBA MULYA	Jl Imam Bonjol.Gg Jati Karya Madiun	Perdag ngan	5.000.000	425.000	4.242.425	299.515			4.242.425	299.515
	8 Depot "SUMBER RASA"	Jl Letjeh Harjono No.25 Madiun	Perdag ngan	2.000.000	170.000	1.515.152	90.000			1.515.152	90.000
	9 BENGKEL "RESTU"	Jl RonggoJumeno Madiun	Jasa	3 000.000	255.000	800.000	-			800.000	-
	10 TokoMantab	Jl Letjen Haryono Madiur.	Perd g	15.000000	1700.000	13.18181	1.31818			13.181.818	1.318.182
	11 Perusahaan Golang - Galing Super	Jl. Kalasan No 1 Madi'jn	Perde	20.000000	2.266.667	9.696.976	1648.48			9.696.976	1.648.485
		JUMLAH MADIUN		68.500000	6814.119	44.69095	4232.19			44.690950	4.232196
	PONOROGO										
	1 Toko Mentari Ponorogo	Jl DI Panaitan 102 Ponoroco	Jasa	7.000.000	595 000	4.666.667	478.333			4.666.667	478.333
		JUMLAH		7 000 000	595.000	4.666.667	478.333			4666.667	478.333

MAGETAN
1 Persh. Genteng Pres Barat

PONOROGO									
Ds. Karangsono - Barat - Magetan	Perd g	10.000000	849.999	7.272.720	468.181			7.272.720	468.181
JUMLAH MAGETAN		10.000000	849.999	7.272.720	468.181	-	-	7.272.720	468.181
JUMLAH SEMUA		85.500000	8259.118	56.63033	5.17871	-	-	56630.337	5.178710



CASH FLOW DANA KEMITRAAN / PUKK *

URAIAN	s.d. Triwuan	Mutasi Tw....	Jumlah s.d Tw
1 SALDO AWAL			
2 PENERIMAAN			
a Dana PUKK/Kemitraan dari Perusahaan			
b Pengembalian Pokok			
1) Usaha Kecil			
2) Koperasi			
Jumlah			
c Bunga Pinjaman			
1) Usaha Kecil			
2) Koperasi			
Jumlah			
d Jasa Giro			
e Deposito			
f Pemindahan bukuan dari daerah			
g Pemindahbukuan dari Kantor Pusat			
h Lain - lain			
Jumlah 2			
3 PENGELUARAN			
a Bantuan Modal kerja			
1) Usaha Kecil			
2) Koperasi			
Jumlah			
a Hibah / Pendidikan			
c Pajak			
d Biaya Ad m			
e Biaya Bank			
f Biaya Survey			
g Biaya Monitorng			
h Baya Penagihan			
I Pemindahbukuan ke Kantor Pusat			
j Pemindahbukuan ke Daerah			
k Biaya Lain - lain			
Jumlah 3			
SALDOAKHIR (1+2)- 3			

LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN

DANA YANG TERSEDIA

1 Saldo Awal	Rp	
2 Alokasi Penyisihan Laba Yang Ditsrima	Rp	
3 Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman	Rp	
Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp

PENGGUNAAN DANA

1 PINJAMAN

1.1 Sektor Industri	Rp
1.2 Sektor Perdagangan	Rp
1.3 Sektor Pertanian	Rp
1.4 Sektor Peternakan	Rp
1.5 Sektor Perkebunan	Rp
1.6 Sektor Perikanan	Rp
1.7 Sektor Jasa	Rp
1.8 Sektor Lainnya	Rp

Jumlah Pinjaman Rp

2 HIBAH

3.1 Sektor Industri	Rp
3.2 Sektor Perdagangan	Rp
3.3 Sektor Pertanian	Rp
3.4 Sektor Peternakan	Rp
3.5 Sektor Perkebunan	Rp
3.6 Sektor Perikanan	Rp
3.7 Sektor Jasa	Rp
3.8 Sektor Lainnya	Rp

Jumlah Hibah Rp

Jumlah Penggunaan Dana Rp

Sisa Dana yang tersedia (A - B) Rp

Pendapatan TW...

1 Bunga Pinjaman	Rp
2 Jasa Giro	Rp
3 Eunga Deposito	Rp
4 Pendapatan Lain - lain	Rp

Jumlah Pendapatan Rp

Beban Operasional Tw

1 Beban Survei	Rp
2 Beban Monitoring	Rp
3 Beban Penagihan	Rp
4 Beban Administrasi	Rp

Jumlah Pendapatan Rp

Surplus (Defisit) (D - E) Rp

Saldo Per (C+F) Rp



LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN

AKUMULASI SUMBER DANA -

1 Akumulasi Aiokasi Penyisihan Laba s.d ...	Rp
2 Akumulasi Penerimaan Pendapatan s.d.	
2.1 Bunga Pinjaman	Rp
2.1 Sunga Deposito	Rp
2.3 Jasa Giro	Rp
2.4 Pendapatan Lain - lain	Rp
Jumlah 2	Rp
Jumlah Akumulasi Sumber Dana s.d ...	Rp

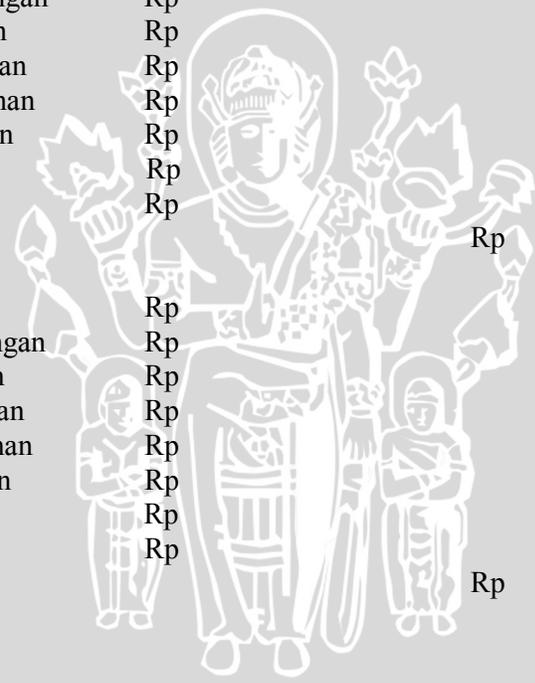
Akumulasi Penyaluran Dana:
Akumulasi Penyaluran Dana s.d

1 PINJAMAN

1.9 Sektor Industri	Rp
1.10 Sektor Perdagangan	Rp
1.11 Sektor Pertanian	Rp
1.12 Sektor Peternakan	Rp
1.13 Sektor Perkebunan	Rp
1.14 Sektor Perikanan	Rp
1.15 Sektor Jasa	Rp
1.16 Sektor Lainnya	Rp
Jumlah Pinjaman	Rp

2 HIBAH

3.9 Sektor Industri	Rp
3.10 Sektor Perdagangan	Rp
3.11 Sektor Pertanian	Rp
3.12 Sektor Peternakan	Rp
3.13 Sektor Perkebunan	Rp
3.14 Sektor Perikanan	Rp
3.15 Sektor Jasa	Rp
3.16 Sektor Lainnya	Rp
Jumlah Hibah	Rp



Neraca program kemitraan
Per....
Drive/daop....

I. AKTIVA

I.1. Aktiva Lancar

- I.2.1. Kas
 - I.2.2. Giro
 - I.2.3. Deposito
 - I.2.4. Piutang pinjaman mitra binaan
 - I.2.5. Piutang alokasi laba
 - I.2.6. Aktiva lancar lainnya
- Jumlah aktiva lancar

I.2. Aktiva Tetap

- I.2.1. Kendaraan
 - I.2.2. Akun penyusutan kendaraan
 - I.2.3. Inventaris kantor
 - I.2.4. Akun penyusutan inventaris kantor
 - I.2.5. Aktiva tetap lainnya
 - I.2.6. Akun penyusutan aktiva tetap lainnya
- Jumlah nilai buku aktiva tetap

I.3 Aktiva lain-lain

- I.3.1 Piutang bermasalah
 - I.3.2 Jumlah aktiva lain-lain
- Jumlah aktiva

II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS

II.1. kewajiban

- II.2.1. kewajiban lancar
 - II.2.2. kewajiban tidak lancar
- jumlah kewajiban

II.2. ekuitas

- II.2.1. saldo awal ekuitas
 - II.2.2. alokasi laba tahun berjalan
 - II.2.3. surplus defisit
- jumlah ekuitas

jumlah kewajiban dan ekuitas

CASH FLOW DANA PROGRAM
 BINA LINGKUNGAW
 DIVRE / DAOP ;

No	URAIAN	Jumlah Rp
A	DANA TERSEDIA	
	1 SALDO AVVAL	
	2 PENERIMAAN ALOKASI LAB A	
	2.1 Eks Laba sebelum tahun 2003	
	2.2 Eks Laba tahun 2003	
	Jumlah 2	
	3 Penerimaan Jasa Giro / bunga deposito	
	4 Lain - lain	
	Jumlah Dana Tersedia	
B	PENGGUNAAN DANA	
	1 Program Bina Ling>.ung_an	
	1.1 Bantuan korban bencana alam	
	1.2 Bantuan :	
	1.1.1 Pendidikan	
	1.1.2 Pelatihan	
	1.3 Bantuan Peningkatan Kesehatan	
	1.4 Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	
	1.5 Bantuan Sarana Ibadah	
	Jumlah 1	
	2 Beban Operasional	
	1.1 Beban Survey/penelitian, monitoring / evaluasi dan penyerahan banuan	
	. 1.2 beban - beban _pengiriman barang	
	1.3 Bantuan sarana ibadah	
	Jumlah 2	
C	SALDO AKHIR (A - B)	



KUALITAS PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN MENURUT SEKTOR USAHA

S.D.....

DIVRE/DAOP:.....

No	KUALITAS PINJAMAN	S E K T O R																JUMLAH	
		industri		perdagangan		pertanian		peternakan		perkebunan		perikanan		jasa		lainnya		Unit	Rp
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp		
1	Prop 1.1. Kab																		
2	- Lancar																		
	"- Kurang Lancar																		
	- Diragukan																		
	- Macet																		
	Jumlah																		
	dst																		
	<i>Jumlah</i>																		

Keterangan

- 1 Lancar = pembayaran tepat waktu / sesuai isi perjanjian
- 2 Kurang Lancar = terlambat bayar 1 hari s.d <180hari
- 3 Diragukan = terlambat bayar > 180 hari s.d < 360 hari
- 4 Macet = terlambat bayar > 360 hari

**DAFTAR KOLEKTIBILITAS PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN
S.D.....
DENGAN KUALITAS LANCAR / KURANG LANCAR / RAGU - RAGU / MACET *)**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN		KEWAJIBAN		REASUSI		TUIMGGAKAN	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	a	9	10	11 (7-9)	12 (3-10)
1	Propinsi										
2	a. Kab 1. Nama ,,,,, dst	*									
<i>Jumlah</i>											

keterangan

- 1 Lancar = pembayaran tepat waktu / sesuai isi perjanjian
- 2 Kurang Lancar = terlambat bayar 1 hari s.d < 180 hari
- 3 Diragukan = terlambat bayar > 180 hari s.d < 360 hari
- 4 Macet = terlambat bayar > 360 hari

DAFTAR PINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

DIVRE / DAOP :

POSISI :

No	NAMA	Jenis Usaha	Mulai Mencilil	Pinjaman			Jatuh Tempo			Pengembalian			Tunggakkan			Keterangan
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunqa	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9	10(8+9)	11	12	13 (11+12)	14(8-11)	15(9-12)	16(13+14)	17
I II	USAHA KECIL 1 2 3 dst KOPERSI 1 2 3 dst															
<i>Jumlah</i>																

Keterangan : Tunggakan disebabkan :

- 1 Usaha masih ada, tetapi tidak berkembang karena kualitas kalah bersaing dan kurang pemasaran;
- 2 Usaha bangkrut/likuidasi.
- 3 Itikad kurang baik mitra binaan

PERKEMBANGAN MITRA BINAAN DIVRE / DAOP :

No	NAMA MITRA BINAAN	Jenis Usaha	SEBELUM D1BINA			SETELAH DSBINA			KET		
			ASET (Rp)	OMSET		TENAGA KERJA	ASET (Rp)	OMSET		TENAGA KERJA	
				Vol	Rp			Vol			Rp
<i>JUMLAH</i>											

**PENYEBAB DAN TINDAK LANJUT TUNGGAKAN TERHADAP MITRA BINAAN
DIVRE / DAOP : POSISI :**

No Urut	NAMA MITRA BINAAN	JENIS USAHA	JUMLAH TUNGGAKAN		PENYEBAB TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT
			Rp	TMT		
	<i>JUMLAH</i>					

DAFTAR MUTASI PINJAMAN BERMASALAH (MACET)

S.D

DIVRE /DAOP :

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Kewajiban s.d Triwulan lalu			Mutasi selama Triwulan bejalan						Jumlah s.d Triwulan Berjalan		
							+ (Tambah)			- (Kurang)					
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11 + 12)	14 {(5+8)-11}	15 {(6+9)-12}	16 {(7+10)-13}
1	Propinsi 1. Kab ... Nama... 2. Dst														
<i>Jumlah</i>															

